



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ANALISIS PELAKSANAAN PROYEK OPERASI NASIONAL AGRARIA  
(PRONA) PADA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
TANJUNG BALAI KARIMUN DI KECAMATAN BURU KABUPATEN  
KARIMUN PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial Pada  
Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial**

**OLEH:**

**M. OULIS EKA PUTRA**  
**NIM: 11375103441**



**PROGRAM S1  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
PEKANBARU**

**2020**



## LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau wacana suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

: M. OULIS EKA PUTRA  
: 11375103441  
: ADMINISTRASI NEGARA  
: EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
: ANALISIS PELAKSANAAN PROYEK OPERASI NASIONAL  
AGRARIA (PRONA) PADA KANTOR BADAN PERTANAHAN  
NASIONAL TANJUNG BALAI KARIMUN DI KECAMATAN  
BURU KABUPATEN KARIMUN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

DISETUJUI OLEH :

PEMBIMBING

Dr. Rodi Wahyudi, S.Sos, M.Soc, Sc  
NIP : 130 717108

MENGETAHUI :

DEKAN

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial

KETUA JURUSAN

Administrasi Negara



Dr. Drs. H. Muht. Said HM, M.Ag, MM  
NIP. 19620512 198903 1 003

Dr. Kamaruddin S.Sos, M.Si  
NIP. 19790101 200710 1 003

State Islamic University of Suska Riau



**LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI**

: M. OULIS EKA PUTRA  
 : 11375103441  
 : ADMINISTRASI NEGARA  
 : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
 : ANALISIS PELAKSANAAN PROYEK OPERASI NASIONAL  
 AGRARIA (PRONA) PADA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
 TANJUNG BALAI KARIMUN DI KECAMATAN BURU  
 KABUPATEN KARIMUN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

DISETUJUI OLEH :

KETUA PENGUJI

Dr. Kamarudin, S.Sos. M.Si  
 NIP : 19790101 200710 1 003

MENGETAHUI :

PENGUJI I

Khairunnsyah Purba, S.Sos. M.Si  
 NIP. 19781025 200604 1 002

PENGUJI II

Irdyanti, S.IP. MA  
 NIK.130 411 030

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## ABSTRAK

**ANALISIS PELAKSANAAN PROYEK OPERASI NASIONAL AGRARIA  
(PRONA) PADA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
TANJUNG BALAI KARIMUN DI KECAMATAN BURU KABUPATEN  
KARIMUN PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

OLEH :

**M. OULIS EKA PUTRA  
NIM. 11375103441**

*Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) merupakan program pensertifikatan Hak atas Tanah secara gratis, Dengan diselenggarakannya program ini diharapkan agar masyarakat mendapatkan kepastian Hukum serta tertib administrasi dalam bidang pertanahan. Kantor Badan Pertanahan Tanjung Balai Karimun dalam melaksanakan program ini hanya dapat mensertifikatkan 460 bidang tanah dari target awal 700 bidang tanah yang dilaksanakan di Kelurahan Buru dan Kelurahan Lubuk Puding Kecamatan Buru Kabupaten Karimun. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan PRONA di Kelurahan Buru dan Kelurahan Lubuk Puding Kecamatan Buru serta faktor penghambat pelaksanaan PRONA tersebut, dalam pelaksanaannya kegiatan PRONA meliputi penetapan lokasi, penyuluhan, pengumpulan data yuridis, pengukuran bidang tanah, pemeriksaan tanah, dan penerbitan sertifikat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara dan observasi, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan proyek operasi nasional agraria (PRONA) belum berjalan dengan baik dan belum memenuhi target yang telah ditetapkan dikarenakan lemahnya sinyal GPS dan Internet di lokasi pelaksanaan, jauhnya lokasi pelaksanaan, kurangnya perencanaan ditambah dengan minimnya pengetahuan dan partisipasi masyarakat, serta kurangnya kelengkapan berkas masyarakat pada saat proses pendaftaran, membuat pelaksanaan PRONA terhambat sehingga pelaksanaan menjadi tidak kondusif dan tidak mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya. Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kepulauan Riau harus lebih siap dan sigap dalam menjalankan program PRONA melalui pendekatan sosial terhadap masyarakat, konsep pelaksanaan yang matang, evaluasi secara rutin terhadap hasil yang telah dicapai.*

**Kata kunci:** Kepastian Hukum, Pelaksanaan Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA), Pendaftaran Tanah.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ANALISIS PELAKSANAAN PROYEK OPERASI NASIONAL AGRARIA (PRONA) PADA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL TANJUNG BALAI KARIMUN DI KECAMATAN BURU KABUPATEN KARIMUN PROVINSI KEPULAUAN RIAU” shalawat beriring salam penulis hadiahkan kepada Nabi Muhammad S.A.W yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah kepada alam dengan berilmu pengetahuan yang canggih dan modern seperti sekarang ini.

Penulis skripsi ini bertujuan untuk melengkapi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana (S1) pada jurusan Ilmu Administrasi Negara Sultan Syarif Kasim Riau. Selama penulisan skripsi ini penulis banyak memperoleh bantuan dari pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan rasa penghargaan dan ucapan terimakasih yang setulusnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. KH. Akhmad Mujahidin, S.Ag, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Bapak Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, beserta Wakil Dekan I.II. dan III Fakultas



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

3. Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara.
4. Bapak Dr. Jhon Afrizal, S.H.I., MA. selaku sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara.
5. Bapak Mahmuzar M.Hum, selaku Penasehat Akademis, terima kasih atas waktu, nasehat, masukan dan motivasi yang diberikan kepada penulis selama perkuliahan ini.
6. Bapak Dr. Rodi Wahyudi, S.Sos, M.Soc.Sc selaku dosen konsultasi proposal dan skripsi yang sangat-sangat tulus membantu, memberikan bimbingan, informasi dan arahan kepada penulis selama menyelesaikan skripsi hingga selesai.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Pegawai di Jurusan Ilmu Administasi Negara sebagai aspirasi penulis menjadi manusia yang memiliki ilmu yang baik dan bernilai.
8. Terkhusus dan Teristimewa untuk Ayahanda tercinta YAHYA dan ibunda LUSIANA yang telah merawat, membesarkan, membimbing dengan penuh pengorbanan, kerja keras dan jerih payah untuk dapat mewujudkan cita-cita penulis untuk dapat terus mengejar cita-cita hingga menjadi Sarjana Sosial. Yang cukup sabar menghadapi penulis karena terlambat menyelesaikan S1, maafkan anak mu, Sungguh mulia pengorbananmu,





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**© Hak cipta milik UIN Suska Riau**

**State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**

dengan penuh kesabaran, ketabahan, kasih sayang, dan do'a serta dukungan untuk keberhasilan penulis hingga saat ini.

9. Teristimewa Kepada Adikku tercinta Oulia Dwi Parametha Putri, dan dia titipan Allah sampai sekarang menemani serta merangkul saya Nia Pranita (DOREMON) yang selalu menjadi teman tengkar serta motivasi dalam hidup.

10. Kepada keluarga dan sahabat yang selalu membantu, memotivasi dan mengorbankan waktu DADO, Cincau16, KOKNOOB, MuhammadAffany, LingkarBOOT, Rockabella, Novi Sasmita, Agus Suprianto, Keluarga Besar Asrama Karimun Putra Badang Perkasa

11. Dan kepada seluruh pihak-pihak yang membantu serta pendukung lainnya dalam menyelesaikan skripsi ini tidak mungkin penulis sebutkan satu-persatu, tanpa mereka penulis tidak bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan baik segi isi maupun penulisannya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun demi melengkapi kekurangan tersebut. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

**Pekanbaru, 14 Mei 2019**

**M. OULIS EKA PUTRA**  
**NIM:11375103441**



## DAFTAR ISI

### LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

### LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

### ABSTRAK

### KATA PENGANTAR ..... i

### DAFTAR ISI ..... iv

### DAFTAR TABEL ..... vii

### BAB I PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang masalah..... 1

#### 1.2 Perumusan Masalah Penelitian ..... 6

#### 1.3 Tujuan Penelitian ..... 6

#### 1.4 Manfaat Penelitian ..... 7

#### 1.5 Sistematika Penulisan ..... 8

### BAB II KAJIAN TEORITIS

#### 2.1 Reformasi Administrasi Agraria ..... 10

#### 2.2 Dasar Hukum Pertanahan di Indonesia..... 15

#### 2.3 Pengertian dan Fungsi Sertifikat Hak atas Tanah ..... 18

#### 2.4 PRONA ..... 21

#### 2.5 Maksud dan Tujuan PRONA ..... 31





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**© Hak Cipta dilindungi UIN Suska Riau**

**State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**

6	Penelitian Terdahulu .....	32
7	Kebijakan Pertanahan Dalam Islam.....	37
8	Definisi Konsep .....	44
9	Konsep Operasional.....	46
10	Kerangka Berfikir .....	47

**BAB III METODE PENELITIAN**

3.1	Lokasi Penelitian .....	48
3.2	Jenis Data dan Sumber Data.....	48
3.3	Informan Penelitian .....	49
3.5	Teknik Pengumpulan Data .....	50
3.6	Analisis Data.....	50

**BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

4.1	Sejarah Kabupaten Karimun.....	53
4.2	Visi dan Misi Kabupaten Karimun .....	55
4.3	Letak dan Kondisi Geografis .....	57
4.4	Luas Wilayah .....	59
4.5	Laju Pertumbuhan Penduduk.....	63
4.6	Sejarah Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karimun.....	64
4.7	Visi dan Misi.....	68
4.8	Tugas dan Fungsi Badan Pertanahan Nasional.....	69



**Hak Cipta dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta: milik UIN Suska Riau

4.9	Struktur Organisasi Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karimun .	71
-----	---	----

**BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN**

5.1	Pelaksanaan PRONA .....	73
5.1.1	Penetapan Lokasi .....	74
5.1.2	Penyuluhan PRONA .....	76
5.1.3	Pengumpulan Persyaratan.....	80
5.1.4	Pengukuran Bidang Tanah.....	85
5.1.5	Pemeriksaan Tanah .....	89
5.1.6	Penerbitan Sertifikat .....	92
5.2	Faktor Penyebab PRONA Berjalan Tidak Sesuai Dengan Target Yang Ditetapkan .....	93

**BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN**

6.1	Kesimpulan .....	101
6.2	Saran .....	102

	DAFTAR PUSTAKA .....	104
--	----------------------	-----

**LAMPIRAN**

UIN SUSKA RIAU



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR TABEL

1	Lokasi Kegiatan Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) Kantor Badan Pertanahan Nasional Tanjung balai Karimun Tahun 2017.....	5
1	Data Proyek Operasi Nasional Kantor Badan Pertanahan Nasional Tanjung Balai Karimun Tahun 2017 .....	5
2	Konsep Operasional.....	46
3	Key Informan Penelitian.....	49
4	Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Karimun.....	59
4	Luas Wilayah Kabupaten Karimun per-Kecamatan.....	60
4.3	Puersebaran dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Karimun Menurut Kecamatan.....	61
4.4	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur.....	62
4.5	Angka Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Karimun.....	63
4.6	Tingkat Kepadatan Penduduk Kabupaten Karimun .....	64





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan Proyek Operasi Nasional Agraria di Kecamatan Buru Kabupaten Karimun. Penelitian ini tertuju pada Kantor Pertanahan sebagai instansi vertikal Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten/ Kota, khususnya Kantor Badan Pertanahan Nasional Tanjung Balai Karimun. Dari pelaksanaan Proyek Operasi Nasional Agraria dapat diketahui faktor-faktor pendukung serta penghambat dalam proses pelaksanaan Pensertifikatan ini dan hasil kerja dari Kantor Pertanahan Tanjung Balai Karimun.

Proyek Operasi Nasional Agraria yang selanjutnya disebut Prona adalah satu legalisasi aset dan pada hakikatnya merupakan proses administrasi pertanahan yang meliputi adjukasi, pendaftaran tanah hingga penerbitan sertifikat tanah. Administrasi publik diasumsikan yaitu pemerintah berperan dalam mengemban misi pemberian layanan terhadap publik (Caiden dalam Keban, 2008:4). PRONA merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan ekonomi lemah sampai dengan menengah. Biaya pengelolaan penyelenggaraan PRONA, seluruhnya dibebankan kepada rupiah murni di dalam APBN pada alokasi DIPA BPN RI. Sedangkan biaya-biaya yang berkaitan dengan hak/alat bukti perolehan/penguasaan tanah, patok batas, materai dan BPHTB/PPH menjadi tanggung jawab Peserta PRONA.

Pelaksanaan Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) yang dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional Tanjung Balai Karimun Kepulauan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Riau di Kecamatan Buru, Kelurahan Buru dan Kelurahan Lubuk Puding dengan target sebanyak 700 bidang. Badan Pertanahan Nasional menetapkan Kecamatan Buru, Kelurahan Buru dan Kelurahan Lubuk Puding sebagai lokasi dilaksanakannya Proyek Operasi Nasional (PRONA) dikarenakan sesuai dengan kriteria lokasi dan tujuan PRONA yaitu wilayah yang belum bersertifikat dan masyarakat menengah ke bawah, dikarenakan pada Kecamatan Buru Kelurahan Buru dan Kelurahan Lubuk Puding rata-rata masyarakatnya bekerja sebagai petani dan nelayan tradisional, maka dari itu Badan Pertanahan Nasional Menetapkan Kecamatan Buru Kelurahan Buru dan Kelurahan Lubuk Puding sebagai lokasi PRONA.

Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah Lembaga Pemerintahan Non Kementrian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dan dipimpin oleh kepala. (Sesuai dengan Perpres No. 63 Tahun 2013), badan Pertanahan Nasional mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional, dan sektoral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penjabaran tersebut berkelanjutan dimana pemerintah yang bertanggung jawab mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, dengan tujuan untuk memberikan dasar hukum yang jelas bagi kepemilikan hak-hak atas tanah.

Berkenaan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, negara sebagai kekuasaan tertinggi atas rakyat-rakyatnya berkewajiban untuk:



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- a. Mengatur dan menyelesaikan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa.
- b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang dengan bumi, air dan ruang angkasa.
- c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antar orang-orang dan perbuatan hukum yang menyangkut penguasaan bumi, air dan ruang angkasa.

Perkembangan badan pelayanan milik negara khususnya pelayanan atas tanah dibawah naungan Badan Pertanahan Nasional mencatat bahwa di wilayah Indonesia sebagian besar tanah yang dimiliki oleh masyarakat belum bersertifikat dan ummnya terletak di daerah-daerah terpencil dimana masyarakat tersebut belum paham dan mengetahui hukum pertanahan sehingga kerap terjadi sengketa atas tanah tersebut. Pemerintah berupaya menanggulangi permasalahan-permasalahan tersebut dengan melakukan upaya hukum untuk menjamin kepastian hukum dengan mewajibkan setiap pemilik tanah untuk mendaftarkan tanahnya, sebagaimana diamanatkan pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, sebagai berikut:

“Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Indonesia menurut ketentuan yang diatur oleh Peraturan Pemerintahan“.

Pada tahun 1981 berdasarkan Surat Keputusan Mentri Dalam Negeri Agraria Nomor 189 Tahun 1981 tanggal 15 Agustus 1981, disusunlah Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA). Pada dasarnya PRONA merupakan proyek





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sertifikatan hak atas tanah secara masal dan penyelesaian sengketa-sengketa tanah yang bersifat strategis, kelancaran pelaksanaan PRONA didukung oleh subsidi pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dibebankan kepada Badan Pertanahan Nasional. Pelaksanaan PRONA dilakukan secara terpadu dan diperuntukan bagi seluruh lapisan masyarakat golongan ekonomi lemah yang berada di wilayah desa dan kecamatan yang telah ditunjuk. PRONA dilakukan secara bertahap setiap tahun anggaran yang meliputi seluruh wilayah Indonesia.

PRONA merupakan program yang sangat penting dan menjadi andalan Badan Pertanahan Nasional dalam pelayanannya kepada masyarakat, dalam pelaksanaannya PRONA merupakan proyek yang paling besar dalam penggunaan dana yang disubsidi oleh APBN dibandingkan proyek-proyek Badan Pertanahan Nasional lainnya. Oleh karena itu penulis ingin menganalisis tentang pelaksanaan Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) di Kecamatan Buru Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau, dimana masyarakat yang mengetahui PRONA ini tetapi tidak mengerti sistematis tentang PRONA sebenarnya, dan program ini dikhawatirkan tidak dapat diikuti oleh seluruh masyarakat yang pada dasarnya sangat membutuhkannya juga dapat menimbulkan penyimpangan-penyimpangan birokrasi. Serta menimbulkan pertanyaan bagi penulis akan PRONA yang tidak berjalan lancar.

**Tabel 1.1**  
**Lokasi Kegiatan Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) Kantor Badan**  
**Pertanahan Nasional Tanjung balai Karimun Tahun 2017**

NO.	Kantor Pertanahan Kab/Kota	Target	Kecamatan	Kelurahan
1.	Karimun	700 Bidang	Buru	1. Buru 2. Lubuk Puding

Sumber : Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karimun (2017)

Table 1.1 diatas menjelaskan bahwa, Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) yang ditaja oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karimun memiliki target sebanyak 700 bidang di kecamatan Buru, kelurahan Buru dan kelurahan Lubuk Puding.

**Table 1.2**  
**Data Proyek Operasi Nasional Kantor Badan Pertanahan Nasional**  
**Tanjung Balai Karimun Tahun 2017**

NO.	KELURAHAN	JUMLAH BIDANG	KETERANGAN
1.	Buru	267	Tersertifikat
2.	Lubuk Puding	193	Tersertifikat
	Jumlah	460	Tersertifikat

Sumber : Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karimun (2017)

Dari tabel 1.2 diatas menunjukan bahwa tidak tercapainya target yang sebelumnya ditetapkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karimun



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebanyak 700 bidang di Kecamatan Buru Kelurahan Buru dan Kelurahan Lubuk Puding hanya mampu merealisasikan sebanyak 460 bidang / sertifikat saja. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada 240 sertifikat yang tidak terealisasi.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis merasa perlu mengadakan penelitian terhadap masalah ini yang dituangkan dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul **“ANALISIS PELAKSANAAN PROYEK OPERASI NASIONAL AGRARIA (PRONA) PADA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL TANJUNG BALAI KARIMUN DI KECAMATAN BURU KABUPATEN KARIMUN PROVINSI KEPULAUAN RIAU”**

## 1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis mencoba membahas permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tanjung Balai Karimun di Kecamatan Buru Kabupaten Karimun.
2. Apa faktor penyebab tidak tercapainya target pelaksanaan Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tanjung Balai Karimun di Kecamatan Buru Kabupaten Karimun.

## 1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tanjung Balai Karimun di Kecamatan Buru Kabupaten Karimun.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Untuk mengetahui faktor penyebab tidak tercapainya target pelaksanaan Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tanjung Balai Karimun di Kecamatan Buru Kabupaten Karimun.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Di dalam penelitian tentunya di harapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut.

Adapun manfaat yang dapat diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. manfaat Teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi ilmu administrasi negara dalam menambah pengetahuan di bidang agraria dan menjadi bahan acuan bagi penelitian sejenis dimasa yang akan datang.
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menguatkan ilmu pengetahuan pada administrasi negara dalam bidang agraria.
  - c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan kerja setiap badan pelayanan atau instansi dalam melayani masyarakat.
  - d. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pemahaman atau wacana bagi masyarakat agar mau mengerti dan memahami program-program pemerintah yang dapat membantu masyarakat.
2. Manfaat Praktis
  - a. Bagi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Khasim Riau (UIN SUSKA RIAU) hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

koleksi bacaan sehingga dapat memberikan wawasan dan pengetahuan mengenai studi kajian administrasi negara.

- b. Bagi mahasiswa penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi bagaimana peran Badan Pertanahan Nasional dalam melayani masyarakat.

### 1.5 Sistematika Penulisan

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini akan berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

#### **BAB II : TELAAH PUSTAKA**

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai landasan teori yang mendasari penelitian ini, konsep Operasional, Kerangka berfikir, Defenisi Konsep.

#### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sample, metode pengumpulan data dan analisis data.

#### **BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Dalam bab ini berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian sejarah singkat kantor.

#### **BAB V : HASIL DAN PEMBAHASAN**

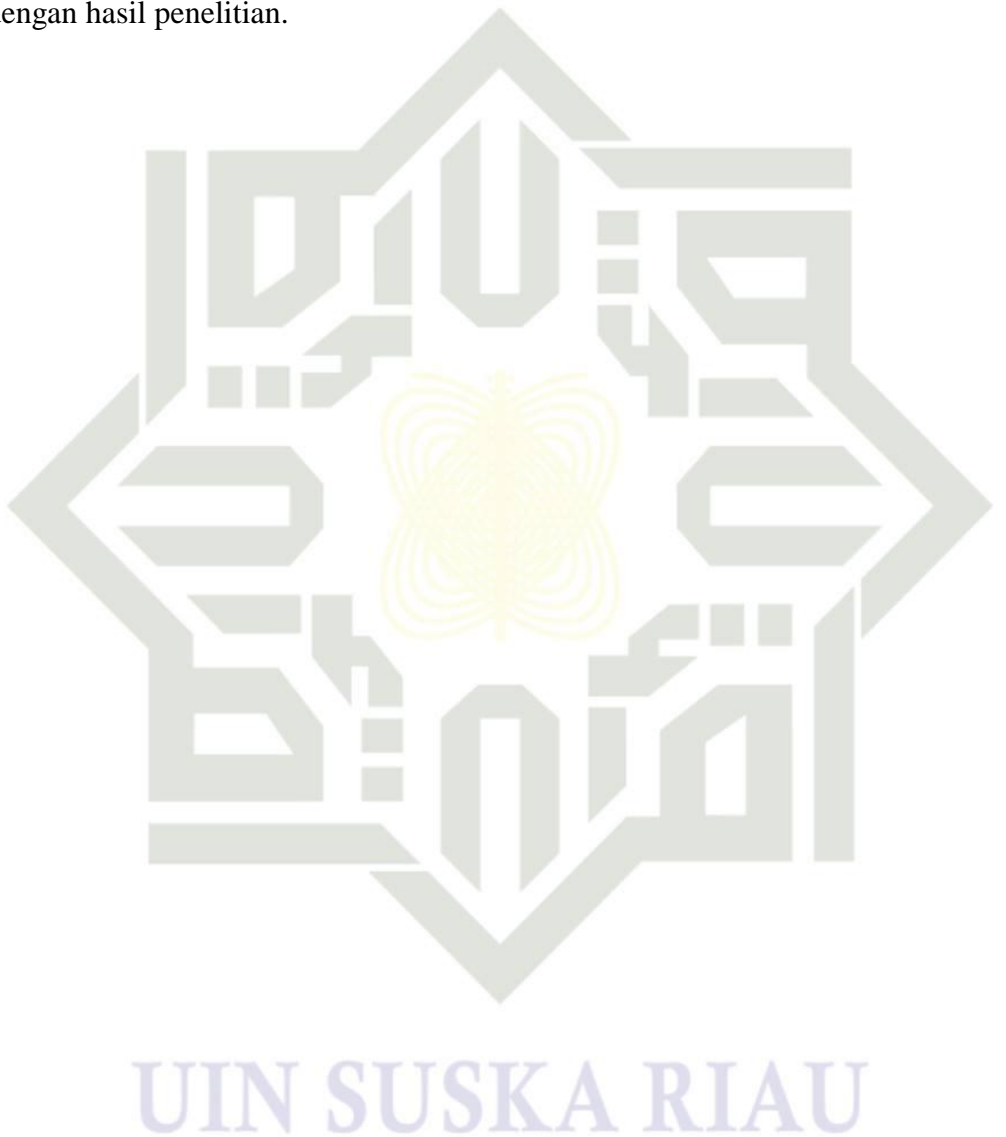
Dalam bab ini akan diuraikan mengenai deskripsi obyek penelitian, analisis data, serta interpretasi hasil.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN**

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan yang merupakan penyajian singkat dari keseluruhan hasil penelitian yang diperoleh dalam pembahasan serta saran-saran yang berhubungan dengan hasil penelitian.





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KAJIAN TEORITIS

#### 2.1 Reformasi Administrasi Agraria

Sikap masyarakat terhadap hukum dalam era reformasi dapat digambarkan dalam beberapa fenomena;

- a) Masyarakat kurang dapat mempercayai hukum sebagai sarana yang dapat memberikan keadilan, hal ini didukung dengan adanya bukti bahwa sebagian aparat pemerintah yang sedang berkuasa telah melakukan perbuatan tercela, memperkaya diri sendiri secara melawan hukum tapi seolah-olah legal atau sah dimata hukum.
- b) Walaupun masyarakat meminta tuntutan kepada pemerintah berdasarkan hukum dimuka pengadilan dan kemudian penguasa dikalahkan, jarang sekali penguasa mau mentaati putusan pengadilan tersebut, misalnya dalam perkara peradilan tata usaha negara.
- c) Kekuasaan peradilan *blended* dengan kekuasaan pemerintah, oleh sebab itu sulit mengharapkan suatu sikap dan pendirian yang tidak memihak dari peradilan, kecuali hakim yang memiliki kredibilitas tinggi.
- d) Sikap penguasa yang mendasarkan diri pada legalitas formal seringkali bertabrakan dengan sikap masyarakat yang tidak mendukung legitimasinya. Artinya ada kesenjangan antara legalitas dan legitimasi.
- e) Kesenjaangan antara legalitas dan legitimasi hukum yang demikian besar serta turunnya wibawa hukum menimbulkan kegamangan bertindak dari aparat penegak hukum, sekalipun hukum itu kuat legitimasinya



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat akan semakin berani untuk melakukan pelanggaran hukum, tetapi semakin kabur, pelanggaran hukum manakah yang sesungguhnya yang merupakan protes terhadap kurangnya legitimasi dan manakah yang merupakan upaya orang yang sekedar menggaruk keuntungan dalam suasana ketidakpastian hukum.

- f) Dalam suasana ketidak pastian secara tekanan ekonomi, masyarakat mencari ukuran rasa keadilan lain, bukan bersumber pada undang-undang atau putusan pemerintah, tetapi berdasarkan penafsiran sesaat atas fenomena yang terjadi. Bahkan seringkali bukan atas dasar adil atau tidak tetapi lebih mengutamakan upaya pemenuhan kebutuhan nyata sehari-hari.

Ketika negara ini baru merdeka dan mencoba mempertahankan kemerdekaanya, maka siapa yang disebut musuh bersama jelas, yaitu pemerintah Jepang dan Belanda. Kejelasan musuh bersama ini membawa sikap yang sama dan perlakuan yang sama dari masyarakat terhadap pemerintah jajahan tersebut. Rakyat tidak membedakan mana pemimpin jajahan mana rakyat sipil belanda, karena pada pokoknya semua adalah musuh rakyat. Oleh sebab itu bentuk perlawanan baik terhadap orang maupun kekayaan belanda merupakan bentuk perjuangan nyata dari rakyat.

Dari konsep pemikiran demikian, yaitu apa yang diambil dan dikuasai adalah barang rampasan, maka tidak dapat ditafsirkan bahwa pengambilan demikian dianggap melawan hukum, kecuali hukum pemilik barang tersebut rakyat menganggap pemerintah Indonesia tidak boleh melarangnya karena apa



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

yang diambil dan dikuasai itu bukan milik pemerintah. Dalam perjanjian KMB mengenai keuangan, para pemilik *onderneming* masih diakui oleh pemerintah Indonesia sebagai pemiliknya yang sah. Kegawatan situasi negara berpuncak pada dimungkannya negara dalam bahaya *Staat Van Oorlogen Beleg* S. (1939-582), memberikan kekuasaan kepada militer untuk mengatasi persoalan perkebunan. oleh sebab itulah berbagai peraturan telah dikeluarkan sehubungan dengan pemakaian tanah perkebunan oleh rakyat. Banyak tanah perkebunan yang kemudian berada dibawah pengawasan militer. Pada tahun 1958 sebagai jawaban atas sengketa Irian Jaya karena Belanda tidak mau menyerahkan Irian Jaya secara damai, memberikan peluang militer untuk menggantikannya. Bahkan kemudian militer mempunyai perkebunan sendiri atas nama koperasi.

Bersamaan dengan bergantinya pimpinan perkebunan ke tangan militer, maka rakyat yang menduduki perkebunan yang semula berhadapan dengan pemilik asing, kini berhadapan dengan militer. Aksi-aksi sepihak yang dilakukan oleh Barisan Tani Indonesia (BTI) di berbagai tempat harus berhadapan dengan militer. Maka sejak itulah konflik militer dengan (BTI) semakin kental dan transparan. Masalah konflik perkebunan, secara yuridis, masuk dalam cakupan masalah *land reform*, sehingga cara pemecahannya masuk dalam wewenang pengadilan *land reform*. Adapun *land reform* sendiri merupakan inti masalah reformasi hukum agraria. Tanpa disadari pengendapan masalah ini telah berkembang sedemikian rupa bersamaan dengan kemajuan pemerataan pemerintah daerah. Daerah-daerah penduduk mulai tertata dan membentuk





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai desa. Komunitas ini akhirnya mengajukan pengakuan lewat pemerintah daerah setempat kepada gubernur untuk menjadi sebuah desa darurat.

Desa darurat tersebut pelan tapi pasti akan menjadi desa permanen yang konsekuensinya harus dipenuhi beberapa sarana dan prasarana dan akhirnya penduduk yang ilegal tersebut menjadi legal. Proses penguatannya kemudian dibuktikan dengan memberikan sertifikat pada masing-masing tanah yang telah diduduki tersebut.

Kedudukan perusahaan negara atau swasta yang mempunyai hak guna usaha sering kali hanya tampak sebagai objek belaka, yang selalu harus dibenturkan kepada kenyataan yang harus diterima, yaitu mereka harus melepaskan bagian dari hak guna usahanya untuk diberikan kepada rakyat yang mendudukinya.

Era reformasi ini sebagai masa transisi, membuka peluang orang mencapai tujuannya dengan jalan pintas. Hal ini akan membawa akibat-akibat post-reformasi berupa kerusakan fisik dan mental. Yang pertama terasa ialah patahnya kontinuitas kehidupan masyarakat dengan konsekuensi timbulnya improvisasi dari pola-pola kehidupan baru yang tidak menetap yang membuat timbulnya keraguan dalam hubungan masyarakat yang tanpa pedoman.

Terjadi proses de-Orde baru-nisasi, yaitu norma-norma hukum produk orde baru yang dianggap menindas, dijebol dan diupayakan diganti dengan norma-norma baru yang demokratis. Namun demikian, penggantian ini karena kerusakan mental aparat maupun ketentuan hukumnya memerlukan waktu untuk rehabilitasinya. Maka bertambah lagi keragu-raguan dalam kehidupan tanpa



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pedoman, sementara aparat penegak hukum berada dalam situasi dilematis. Dalam situasi demikian, bagi sebagian orang yang ingin memanfaatkannya dengan melakukan penjarahan, penculikan, maupun pembunuhan secara massal, mendapat keuntungan dari situasi keraguan tersebut.

Perbuatan yang dilakukan secara masal serta jumlah aparat yang terbatas menimbulkan kesan kelambanan aparat dalam melakukan tindakan dan koordinasi menangani masalah tersebut melalui pemahaman yang benar menurut hukum serta mencari jalan keluar yang tepat dalam batas koridor, ketertiban, keamanan, dan kesejahteraan rakyat. pemilik perkebunan harus memahami dirinya sebagai bagian dari masyarakat yang juga membutuhkan ketenagaan dalam usaha, yang oleh sebab itu prinsip fungsi sosial hak atas tanah sebagaimana yang dicantumkan dalam pasal 6 UUPA (LN. 1960-104) membuka jalan untuk memberikannya manfaat bagi masyarakat sekitarnya. Melalui jalan kemitraan yang saling menguntungkan dalam batas-batas yang aman harusnya dibangun kerjasama yang baik dengan masyarakat setempat. Sekalipun demikian, pihak perkebunan harus mendapat jaminan bahwa kemitraan itu tidak dijadikan batu loncatan untuk memperoleh hak secara memaksa dan melawan hukum oleh masyarakat.

Dalam suatu negara yang tertib dan maju serta budaya yang luhur, memperoleh hak secara terhormat adalah bagian dari pembudayaan hukum masyarakat Indonesia yang dicita-citakan bersama. Pembudayaan kekerasan untuk memperoleh hak harus dicegah apalagi pembodohan terhadap rakyat untuk keuntungan segelintir orang. Reformasi agraria bukan pembudayaan kekerasan atau pembodohan rakyat karena hal itu menyimpang dari cita-cita luhur bangsa



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tetapi benar-benar Kesetiaan penerapan hukum yang adil yang oleh karena itu harus ditegakkan bersama.

## 2.2 Dasar Hukum Pertanahan di Indonesia

Kebijakan petanahan di Indonesia telah diatur dalam beberapa Undang-Undang, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional, yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
2. Undang-Undang Nomor 56 PRP Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian;
3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Batam, Bintan dan Karimun;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional;
11. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
12. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;
13. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan;
14. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2007 tentang Panitia Pemeriksaan Tanah;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.02/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.02/2010, tentang Indeks Dalam Rangka Perhitungan Penetapan Tarif Pelayanan PNBPN pada Badan Pertanahan Nasional;
16. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah;



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

17. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
18. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kantor Pertanahan di Kabupaten Karimun Provinsi Riau;
19. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Riau;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karimun Tahun 2011-2031;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pajak-Pajak Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 2 Tahun 2012 tanggal 11 Juli 2012 tentang Pembentukan Kecamatan, Kelurahan dan Desa Kabupaten Karimun;
23. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2015 tentang Program Nasional Agraria (PRONA);
24. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang No. 12 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.3 Pengertian dan Fungsi Sertifikat Hak atas Tanah

Tanah merupakan suatu rahmat dan anugerah dari Allah SWT yang sengaja diciptakan untuk tempat bermukimnya makhluk hidup dalam melaksanakan kehidupannya. Pengertian ini memberikan makna bahwa manusia sebagai makhluk hidup sangat membutuhkan tanah atau lahan, baik digunakan sebagai tempat tinggal, tempat bercocok tanam, maupun untuk tempat usaha lainnya, sementara persediaan lahan yang ada sangat terbatas. Oleh karena itu ada kecenderungan bahwa setiap orang berusaha menguasai dan mempertahankan bidang-bidang tanah/lahan tertentu termasuk mengusahakan status hak kepemilikannya. Dalam sistem hukum Agraria di Indonesia dikenal ada beberapa macam hak penguasaan atas tanah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1961 tentang Pokok Agraria, yaitu antara lain: Hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan.

Pada dasarnya istilah sertifikat itu sendiri berasal dari bahasa Inggris yaitu *certificate* yang berarti ijazah atau surat keterangan yang dibuat oleh pejabat tertentu. Dengan pemberian surat keterangan berarti pejabat yang bersangkutan telah memberikan status tentang keadaan seseorang. Istilah sertifikat tanah dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai surat keterangan tanda bukti pemegang hak atas tanah dan berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Dengan penerbitan sertifikat hak atas tanah bahwa telah menerangkan bahwa seseorang itu mempunyai hak atas suatu bidang tanah, ataupun tanah seseorang itu dalam





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kekuasaan tanggungan, seperti sertifikat Hipotek atau *Kreditverband*, berarti tanah itu terikat dengan Hipotek atau *Kreditverband* (Budi Harsono:1998).

Pengertian Sertifikat Tanah dapat dilihat dasarnya yaitu dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Pasal 19, menyebutkan bahwa:

Ayat (1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Ayat (2) Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi :

- a. Pengukuran, pemetaan dan pembukuan tanah
- b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut
- c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat

Dengan berdasar ketentuan Pasal 19 UUPA, khususnya ayat (1) dan (2), dapat diketahui bahwa dengan pendaftaran tanah/pendaftaran hak-hak atas tanah, sebagai akibat hukumnya maka pemegang hak yang bersangkutan akan diberikan surat tanda hak atas tanah dan berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat terhadap pemegang hak atas tanah tersebut.

Sertifikat Tanah atau Sertifikat Hak Atas Tanah atau disebut juga Sertifikat Hak terdiri salinan Buku Tanah dan Surat Ukur yang dijilid dalam 1 (satu) sampul. Sertifikat tanah memuat:

- a. Data fisik: letak, batas-batas, luas, keterangan fisik tanah dan beban yang ada di atas tanah;



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

- b. Data yuridis: jenis hak (hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, hak pengelolaan) dan siapa pemegang hak.

Istilah “sertifikat” dalam hal dimaksud sebagai surat tanda bukti hak atas tanah dapat kita temukan di dalam Pasal 13 ayat (3) dan (4) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 1961, bahwa:

Ayat (3) Salinan Buku Tanah dan Surat Ukur setelah dijahit secara bersama-sama dengan suatu kertas sampul yang bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria, disebut Sertifikat dan diberikan kepada yang berhak”.

Ayat (4) Sertifikat tersebut pada ayat (3) pasal ini adalah surat tanda bukti hak yang dimaksud dalam Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria”.

Serifikat hak atas tanah ini diterbitkan oleh Kantor Agraria Tingkat II (Kantor Pertanahan) seksi pendaftaran tanah. Pendaftaran itu baik untuk pendaftaran pertama kali (*recording of title*) atau pun pendaftaran berkelanjutan (*continious recording*) yang dibebankan oleh kekuasaan hak menguasai dari negara dan tidak akan pernah diserahkan kepada instansi yang lain. Sertifikat tanah yang diberikan itu dapat berfungsi sebagai alat bukti hak atas tanah, apabila dipersengketakan.

Berdasarkan keadaan bahwa pada saat ini banyak terjadi sengketa di bidang pertanahan, sehingga menuntut peran maksimal dan profesionalisme yang tinggi dari petugas Kantor Pertanahan yang secara eksplisit tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai pembatasan waktu untuk menyelesaikan



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

proses pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan maupun pengenaan sanksi kepada petugas Kantor Pertanahan apabila melakukan kesalahan dalam pelaksanaan seluruh dan atau setiap proses dalam pendaftaran tanah. Hal ini erat kaitannya dengan hakikat dari sertifikat tanah itu sendiri, yaitu:

- a. Memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak baik oleh manusia secara perorangan maupun suatu badan hukum;
- b. Merupakan alat bukti yang kuat bahwa subjek hukum yang tercantum dalam sertifikat tersebut adalah pemegang hak sesungguhnya, sebelum dibuktikan sebaliknya atau telah lewat jangka waktu 5 (lima) tahun sejak penerbitan sertifikat tanah;
- c. Memberikan kepastian mengenai subjek dan objek hak atas tanah serta status hak atas tanah tersebut.

### 2.4 PRONA

Dalam Pasal 1 PP No. 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah disebutkan pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

### 1. Sertifikasi PRONA

Nama kegiatan legalisasi aset yang umum dikenal dengan PRONA, adalah singkatan dari Proyek Operasi Nasional Agraria. PRONA adalah salah satu bentuk kegiatan legalisasi aset dan pada hakekatnya merupakan proses administrasi pertanahan yang meliputi; adjudikasi, pendaftaran tanah sampai dengan penerbitan sertifikat/tanda bukti hak atas tanah dan diselenggarakan secara massal. PRONA dimulai sejak tahun 1981 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 189 Tahun 1981 Tentang Proyek Operasi Nasional Agraria. Berdasarkan keputusan tersebut, Penyelenggara PRONA bertugas memproses pensertipikatan tanah secara masal sebagai perwujudan daripada program Catur Tertib di Bidang Pertanahan.

Kegiatan PRONA pada prinsipnya merupakan kegiatan pendaftaran tanah pertama kali. PRONA dilaksanakan secara terpadu dan ditujukan bagi segenap lapisan masyarakat terutama bagi golongan ekonomi lemah dan menyelesaikan secara tuntas terhadap sengketa-sengketa tanah yang bersifat strategis. Tujuan PRONA adalah memberikan pelayanan pendaftaran pertama kali dengan proses yang sederhana, mudah, cepat dan murah dalam rangka percepatan pendaftaran tanah diseluruh indonesia dengan mengutamakan desa miskin/tertinggal, daerah pertanian subur atau berkembang, daerah penyangga kota, pinggiran kota atau daerah miskin kota, daerah pengembangan ekonomi rakyat.

PRONA merupakan salah satu wujud upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan ekonomi lemah sampai

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Sarif Kasim Riau

dengan menengah. Biaya pengelolaan penyelenggaraan PRONA, seluruhnya dibebankan kepada rupiah murni didalam APBN pada alokasi DIPA BPN RI. Sedangkan biaya-biaya yang berkaitan dengan alas hak/alat bukti perolehan/penguasaan tanah, patok batas, materai dan BPHTB/PPH menjadi tanggung jawab Peserta PRONA.

Peserta PRONA berkewajiban untuk :

1. Menyediakan atau menyiapkan Alas hak sebagai alat bukti perolehan penguasaan tanah yang akan dijadikan dasar pendaftaran tanah sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Menunjukkan letak dan batas-batas tanah yang dimohon (dapat dengan kuasa);
3. Menyerahkan Bukti Setor Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Bukti Setor Pajak Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan Bangunan (PPH) bagi peserta yang terkena ketentuan tersebut; dan
4. Memasang patok batas tanah sesuai ketentuan yang berlaku.

### 2. Kriteria Subyek PRONA

Subyek atau peserta PRONA adalah masyarakat golongan ekonomi lemah sampai dengan menengah. Masyarakat golongan ekonomi lemah sampai dengan menengah yang memenuhi persyaratan sebagai subyek/peserta PRONA yaitu pekerja dengan penghasilan tidak tetap antara lain petani, nelayan, pedagang, peternak, pengrajin, pelukis, buruh musiman dan lain-lain pekerja dengan penghasilan tetap :

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Pegawai perusahaan baik swasta maupun BUMN/BUMD dengan penghasilan per bulan sama atau di bawah Upah Minimum Regional (UMR) yang ditetapkan oleh masing-masing kabupaten/kota, yang dibuktikan dengan penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan surat keterangan penghasilan dari perusahaan;
2. Veteran, Pegawai Negeri Sipil pangkat sampai dengan Penata Muda Tk.I (III/d), prajurit Tentara Nasional Indonesia pangkat sampai dengan Kapten dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia pangkat sampai dengan Komisaris Polisi, dibuktikan dengan foto copy Surat Keputusan pangkat terakhir;
3. Istri/suami veteran, istri/suami Pegawai Negeri Sipil, istri/suami prajurit Tentara Nasional Indonesia, istri/suami anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf b), dibuktikan dengan foto copy Surat Keputusan pangkat terakhir dan akta nikah;
4. Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, pensiunan Tentara Nasional Indonesia dan pensiunan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dibuktikan dengan foto copy Surat Keputusan pensiun;
5. Janda/duda pensiunan Pegawai Negeri Sipil, janda/duda pensiunan Tentara Nasional Indonesia, janda/duda pensiunan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dibuktikan dengan foto copy Surat Keputusan pensiun janda/duda dan akta nikah.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Kriteria Penetapan Lokasi PRONA

Di dalam penetapan lokasi PRONA perlu memperhatikan kondisi wilayah dan infrastruktur pertanahan yang tersedia.

#### A. Kondisi Wilayah :

Lokasi Kegiatan PRONA diarahkan pada wilayah-Wilayah sebagai berikut:

1. desa miskin/tertinggal;
2. daerah pertanian subur atau berkembang;
3. daerah penyangga kota, pinggiran kota atau daerah miskin kota;
4. daerah pengembangan ekonomi rakyat;
5. daerah lokasi bencana alam;
6. daerah permukiman padat penduduk serta mempunyai potensi cukup besar untuk dikembangkan;
7. daerah diluar sekeliling transmigrasi;
8. daerah penyangga daerah Taman Nasional;
9. daerah permukiman baru yang terkena pengembangan prasarana umum atau relokasi akibat bencana alam.

#### B. Infrastruktur Pertanahan

Penetapan lokasi wilayah desa/kelurahan PRONA, hendaknya memperhatikan ketersediaan infrastruktur pertanahan, antara lain :

1. Rencana Umum Tata Ruang Wilayah;
2. Inventarisasi Pengaturan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T);



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Peta Penatagunaan Tanah;
4. Peta Pengukuran dan Pendaftaran Tanah (Fotogrametis);
5. Infrastruktur Titik Dasar Teknik dan Peta Dasar Pendaftaran;
6. Teknologi Informasi dan Komunikasi;
7. Mobil dan peralatan Larasita; dan
8. Infrastruktur lainnya.

#### 4. Kriteria Obyek PRONA

1. Tanah sudah dikuasai secara fisik
2. Mempunyai alas hak (bukti kepemilikan)
3. Bukan tanah warisan yang belum dibagi
4. Tanah tidak dalam keadaan sengketa
5. Lokasi tanah berada dalam wilayah kabupaten lokasi peserta program yang dibuktikan dengan KTP
6. Memenuhi ketentuan tentang luas tanah maksimal obyek PRONA.

#### 5. Luas dan Jumlah Tanah Obyek Prona

##### A. Tanah Negara :

1. Tanah non pertanian dengan luas sampai dengan 2.000 m<sup>2</sup> (dua ribu meter persegi), kecuali obyek PRONA yang berlokasi wilayah Kab/Kota Kantor Pertanahan tipe A sampai dengan luas 500 m<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi); dan
2. Tanah pertanian dengan luas sampai 2 ha (dua hektar).

##### B. Penegasan konversi/pengakuan hak :

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Tanah non pertanian dengan luas sampai dengan 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi), kecuali obyek PRONA yang berlokasi wilayah Kab/Kota Kantor Pertanahan tipe A sampai dengan luas 1.000 m<sup>2</sup> (seribu meter persegi); dan
2. Tanah pertanian dengan luas sampai 5 ha (lima hektar).

#### C. Jumlah bidang tanah :

Bidang tanah yang dapat didaftarkan atas nama seseorang atau 1 (satu) peserta dalam kegiatan PRONA paling banyak 2 (dua) bidang tanah.

#### 6. Tahapan Pelaksanaan PRONA

Menurut Pasal 6 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Program Nasional Agraria (PRONA), ruang lingkup kegiatan PRONA meliputi :

1. Penyerahan DIPA
2. Penetapan lokasi
3. Penyuluhan
4. Pengumpulan data/alat bukti/alas hak
5. Pengukuran bidang tanah
6. Pemeriksaan tanah
7. Pengumuman, dalam hal bekas tanah milik adat
8. Penerbitan SK Hak/Pengesahan data fisik dan data yuridis
9. Penerbitan Sertifikat
10. Penyerahan Sertifikat





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

#### 7. Sumber Biaya Prona

Berdasarkan Keputusan Menteri Agraria/Kepala Badan pertanahan Nasional No. 4 Tahun 1995 tentang Perubahan Besarnya Pungutan Biaya Dalam Rangka Pemberian Sertipikat Hak Tanah yang Berasal Dari Pemberian Hak Atas Tanah Negara, Penegasan Hak Tanah Adat dan Konversi Bekas Hak Tanah Adat, yang Menjadi Obyek Proyek Operasi Nasional Agraria.

Biaya untuk pelaksanaan pengelolaan kegiatan PRONA bersumber dari rupiah murni pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang dialokasikan ke DIPA-BPN RI. Anggaran dimaksud meliputi biaya untuk:

1. Penyuluhan;
2. Pengumpulan Data (alat bukti/alas hak);
3. Pengukuran Bidang Tanah;
4. Pemeriksaan Tanah;
5. Penerbitan SK Hak/Pengesahan Data Fisik dan Data Yuridis;
6. Penerbitan Sertipikat;
7. Supervisi dan Pelaporan.

Sedangkan biaya materai, pembuatan dan pemasangan patok tanda batas, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan Bangunan (PPH) bagi yang terkena ketentuan perpajakan menjadi beban kewajiban peserta program.

Pada Pasal 1 ayat (1) Keputusan Menteri Agraria No. 4 Tahun 1995 menyatakan sebagai berikut:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

"Pemberian hak-hak atas tanah negara kepada masyarakat, penegasan/pengakuan atas tanah-tanah hak adat dan tanah-tanah lainnya yang ditentukan sebagai lokasi Proyek Operasi Nasional Agraria dalam rangka persertifikatkan tanah secara masal, dibebaskan dari kewajiban membayar uang pemasukan kepada Negara seperti yang telah ditentukan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1975, dan kepada penerima hak-haknya dikenakan kewajiban membayar biaya administrasi".

Berdasarkan ketentuan tersebut, pensertipikatan tanah dalam rangka PRONA dibebaskan dari kewajiban membayar uang pemasukan kepada Negara, tapi penerima sertipikat tanah PRONA tetap harus membayar biaya administrasi. Hal ini juga sesuai dengan informasi yang tercantum dalam laman resmi Badan Pertanahan Nasional.

Perincian biaya administrasi PRONA sebagai berikut:

#### A. Pemberian hak atas tanah Negara:

##### 1. Di daerah pedesaan

Untuk luas tanah sampai dengan 2 Ha sebesar Rp 3.000,-

##### 2. Di daerah perkotaan

##### a. Untuk jenis penggunaan pertanian yang luasnya kurang dari

2000 M2 sebesar Rp 5.000,-

##### b. Untuk jenis penggunaan bukan pertanian yang luasnya sampai

2.000 M2 sebesar Rp 10.000,-

#### B. Asal tanah milik adat :

##### 1. Daerah pedesaan



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Untuk luas tanah sampai 2 Ha sebesar Rp. 1.000,-

2. Di daerah perkotaan

Untuk luas tanah sampai 2.000 M2 sebesar Rp 1.000,-

Di samping biaya administrasi, kepada setiap penerima hak atas tanah Negara dikenakan pula uang sumbangan untuk penyelenggaraan Landreform sebesar 50% dari biaya administrasi.

Setiap pemohon dikenakan biaya Panitia A sebesar Rp. 1250,- untuk tiap bidang apabila lokasi tanah dalam proyek terdiri dari 10 bidang; sebesar Rp. 2.500,- apabila lokasi tanah dalam proyek terdiri dari 5 sampai 9 bidang.

Untuk biaya pendaftaran hak dikenakan pungutan sebesar :

#### A. Untuk konversi hak adat

1. Rp 10.000,- untuk daerah perkotaan;
2. Rp. 1.000,- untuk daerah pedesaan;

#### B. Untuk penegasan hak

1. Rp. 10.000,- untuk daerah perkotaan;
2. Rp. 1.000,- untuk daerah pedesaan;

#### C. Untuk tanah negara

1. Rp. 10.000; untuk daerah pedesaan;
2. Rp. 1.000,- untuk daerah pedesaan;

Untuk biaya formulir sertifikat, dikenakan pungutan sebesar Rp. 2.000,-. Jadi, pengurusan sertipikat tanah PRONA memang dikenakan biaya yaitu biaya administrasi yang perinciannya telah kami jelaskan di atas.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hal ini dikuatkan dengan adanya larangan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/BPN untuk melakukan pungutan biaya dalam pelayanan kepada masyarakat, sesuai dengan instruksi Menteri ATR/BPN pada Surat Edaran Nomor 709/3.2/2016 Tentang Pungutan Pada Kegiatan PRONA, bahwa dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat dibidang pertanahan, khususnya untuk kegiatan PRONA dan kegiatan legalisasi asset tanah yang di biayai oleh APBN/APBD.

### 2.5 Maksud dan Tujuan PRONA

PRONA adalah singkatan dari Proyek Operasi Nasional Agraria. PRONA diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2015 tentang Program Nasional Agraria (PRONA), pengertian PRONA sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2015 tentang Program Nasional Agraria (PRONA), pada pasal 1 ayat 1 yang berbunyi:

”Program Nasional Agraria selanjutnya disingkat PRONA adalah rangkaian kegiatan pensertifikatan tanah secara masal, pada suatu wilayah administrasi Desa/ Kelurahan atau sebutan lain atau bagian-bagiannya.”

Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) juga memiliki tujuan sebagaimana telah dijelaskan pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2015 tentang Program Nasional Agraria pada pasal 2 ayat 1, yang berbunyi:

”PRONA bertujuan memberikan pelayanan pendaftaran tanah pertama kali dengan proses yang sederhana, mudah, cepat, dan murah dalam rangka percepatan



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

pendaftaran tanah di seluruh Indonesia untuk menjamin kepastian hukum hak atas tanah”.

Selain itu Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 189 Tahun 1981 tentang Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA).

Menetapkan:

- a. memproses pensertifikatan tanah secara masal sebagai perwujudan dari pada program catur tertib di bidang pertanahan yang pelaksanaannya dilakukan secara terpadu dan di tujukan bagi segenap lapisan masyarakat terutama bagi golongan ekonomi lemah.
- b. menyelesaikan secara tuntas terhadap sengketa-sengketa tanah yang bersifat strategis.

## 2.6 Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pendaftaran pertanahan, yaitu:

Rudy Irawan (2017), jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau meneliti tentang “*Evaluasi Program Layanan Rakyat Untuk Sertifikat Tanah (LARASITA) di Kabupaten Kampar*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik purpose sampling. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan BPN Kabupaten Kampar, Ketua Larasita, Sekretaris Larasita, Anggota Larasita, Kasi Pemerintahan Kecamatan Siak Kecamatan Siak Hulu, Kampar Kiri dan Bangkinang, Kades Tanah Merah, Kades Sungai Harapan, Kasi Pemerintahan Kelurahan Pasir Sialang serta Masyarakat. Dari hasil analisis data secara deskriptif kualitatif dari sisi evaluasi,



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Program layanan untuk Sertifikasi Tanah (LARASITA) di Kabupaten Kampar belum berhasil, Hal ini dilihat dari tidak tercapainya tujuan atau sasaran yang diinginkan dari program ini selain itu juga ditemukan faktor-faktor yang mempengaruhi evaluasi kebijakan, yaitu: Kurangnya Sosialisasi,, Kurangnya Sumberdaya Manusia dan Anggaran Operasional, minimnya kendaraan bergerak dan perangkat komunikasi yang sering terganggu serta persepsi masyarakat tentang program ini.

Fahrul Islam (2017) Jurusan Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar meneliti tentang “*Analisis Pelayanan Administrasi Pertanahan di Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Pinrang*”.

Hasil penelitian menunjukkan, dengan sampel yang dipilih secara acak berjumlah 30 orang dengan menggunakan metode wawancara kemudian data di analisis secara deskriptif dapat diketahui Penyelenggaraan Administrasi pertanahan di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pinrang menunjukkan bahwa terdapat masalah pada waktu pengurusan yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Biaya yang dibebankan kepada masyarakat yang mengurus sertifikat sendiri sudah sesuai, artinya tidak ada lagi biaya-biaya tambahan. Kemudian indikator berikutnya adalah kualitas pelayanan pegawai BPN memiliki masalah pada kekurangramahan yang ditunjukan pegawai BPN itu sendiri kepada masyarakat yang melakukan pengurusan sertifikat, untuk Pemerintah Kecamatan Watang Sawitto, aparat pemerintah Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pinrang diberi kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan baik yang bersifat teknis maupun non teknis dengan harapan, tercapainya tenaga kerja yang terampil





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan ramah selanjutnya akan menciptakan kepuasan pelayanan bagi masyarakat. Disisi lain harus memperbaiki hubungan koordinasi antara kelurahan dan juga BPN dalam proses administrasi pertanahan sehingga tidak terjadi daftar tunggu yang begitu lama. Pemberian pelayanan pada dasarnya tercermin pada kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah mulai dari waktu pelayanan, biaya pelayanan dan keramahan pada saat pelayanan itu sendiri. Pelayanan publik sebagai salah satu dari bagian pemenuhan kesejahteraan maka seharusnya otomatis menjadi pemenuhan hak-hak masyarakat.

Dennys Andreas Sutoppo (2016) Jurusan Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum, Universitas Lampung meneliti tentang “*Kekuatan Hukum Sertifikat Hak Atas Tanah Dikaitkan Dengan Kepastian Hukum Dalam Pendaftaran Tanah*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, kekuatan hukum sertifikat hak atas tanah merupakan jaminan kepastian hukum dari sertifikat sebagai alat bukti kepemilikan yang bersifat kuat artinya sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya oleh pihak lain yang merasa berhak dan mempunyai alat bukti untuk membuktikannya maka dalam hal ini sertifikat tersebut mempunyai kepastian hukum bersifat materil (publikasi negatif berunsur positif) yang dianut dalam hukum tanah nasional. Disisi lain sertifikat mempunyai kepastian hak yang bersifat formil (publikasi positif) yaitu kepastian hukum dari sertifikat yang berisi ketentuan tertulis yang tertera dalam Undang-Undang atau peraturan lainnya bersifat mutlak artinya tidak bias diganggu gugat. Beberapa hal yang dapat memahami kekuatan hukum dan kepastian hukum dari sertifikat yang bersifat formil (publikasi positif) adalah pemakaian sistem publikasi negatif, implementasi



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Pasal 32 ayat (2) yang tidak bisa konsisten karena benturan dengan asas hukum yang ada di pengadilan saat terjadi sengketa tanah, masih banyak tanah dengan hak-hak lama yang belum dikonversi menjadi sertifikat sehingga banyak menimbulkan permasalahan dikemudian hari. Upaya yang dilakukan untuk menjamin kepastian hukum dalam bidang pertanahan melalui sinergi antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah dalam hal ini Kementrian Negara Agraria dan Tata ruang wajib menertibkan sertifikat hak atas tanah berdasarkan asas kepastian hukum, asas kecermatan dan asas aman sedangkan masyarakat berdasarkan asas ketebukaan wajib mengetahui tanah yang termuat dalam sertifikat yang diterbitkan baik lokasi tanah itu berada, luas tanah, dan batas-batas tanah. Maka dengan itulah kepastian dan kekuatan hukum dari sertifikat tanah akan terjamin.

Mulyadi (2013) Jurusan Hukum Perdataan, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar meneliti tentang “*Tinjauan Hukum Status Pengetahuan Tanah Balete di Daerah Pesisir Danau Lapompakka Kabupaten Wajo*”. Hasil Penelitian menunjukan bahwa hasil penelitian yang diperoleh adalah status penguasaan tanah balete yang didasarkan pada hukum kebiasaan setempat yang mayoritas tidak dilengkapi dengan izin pengelolaan maupun kepemilikan dari pemerintah setempat. UUPA tidak mengatur mengenai tanah *balete* tetapi karena berada di daerah pesisir dan terjadi endapan lumpur maka dikategorikan sebagai tanah timbul. Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 16 tahun 2004 Tentang perdata gunaan tanah menetapkan bahwa timbul (tanah *belete*) merupakan tanah negara yang harus dimohonkan hak pengelolaan dan kepemilikan dengan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memperlihatkan garis sempadan dan rencana tata ruang wilayah. Kendala dalam pengesahan status penguasaan tanah *balet* sebagai tanah negara adalah pemerintah belum melakukan tindakan untuk mendata mengenai tanah *balet* di wilayah tersebut serta keengganan masyarakat setempat untuk melaporkan tanah *balet* dikuasainya selama ini, sehingga penguasaannya tidak mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum.

Eka Rahayu (2015) Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin meneliti tentang “*Strategi Pelayanan Sertifikat Tanah Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis data primer dan sekunder yang diperoleh melalui metode observasi, wawancara dan pengamatan langsung. Adapun fokus penelitian ini menggunakan konsep perpaduan strategi yang lebih membahas pada konsep strategi yang dapat dipadukan untuk meraih dan meningkatkan kepuasan pelanggan, yaitu strategi pemasaran, strategi penanganan keluhan yang efektif, dan strategi peningkatan kinerja perusahaan atau kantor. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa strategi pelayanan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang sudah berjalan dengan baik, meskipun pelaksanaannya belum bisa dikategorikan secara maksimal. Terdapat beberapa kekurangan yang diperoleh penulis dalam menggunakan teori tersebut sebagai pedoman penelitian. Adapun kekurangan yang dimaksud terletak pada strategi penanganan keluhan pelanggan yang berjalan kurang efektif. Salah satu faktor yang menyebabkan kurang efektifnya pelaksanaan strategi tersebut adalah masih adanya beberapa petugas yang kurang berempati kepada masyarakat





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai pelanggan. Empati yang kurang itu dapat dilihat dari tingkat ketidakpedulian yang diberikan kepada masyarakat pada saat bertugas. Sehingga masyarakat merasa belum puas dalam menerima pelayanan yang diberikan.

## 2.7 Kebijakan Pertanahan Dalam Islam

### A. Masa Nabi Muhammad SAW

Menurut Abu Ubaid Al-Qasim, (2006). Penataan mula-mula yang dilakukan Nabi Muhammad SAW adalah mempersaudarakan kaum Muhajirin (orang Makkah) dan Anshar (orang Madinah). Kemudian dengan silaturahmi yang sudah terjalin Nabi Muhammad SAW menanamkan kesadaran kepada kaum Anshar, untuk menyerahkan sebagian tanah garapannya kepada kaum Muhajirin, hal itu dilakukan mengingat kondisi kaum Muhajirin pada saat itu rentan karena tidak memiliki harta atau tempat tinggal. Demikian pula untuk pembangunan masjid, masyarakat Madinah dengan rela menyerahkan tanahnya dari Ibnu Abbas ra bahwa tatkala Rasulullah SAW tiba di Madinah, maka penduduk Madinah telah menyerahkan seluruh tanah yang tidak terjangkau air kepada Rasulullah sehingga beliau dapat mengelola dan mengurusnya. Hal itu menunjukkan bahwa pada saat itu telah terjadi praktik *land reform* yang pertama, yang berlangsung secara sukarela.

Dalam perkembangannya jumlah umat Islam terus bertambah, dan wilayah pun terus bertambah. Dengan kondisi itu nabi Muhammad SAW kemudian melakukan beberapa kebijakan untuk mengokohkan ekonomi umat Islam. Diantaranya adalah kebijakan pemberian tanah dari tanah terlantar dan kebijakan menetapkan tanah dari kepentingan umum.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Beberapa riwayat yang menunjukkan adanya pemberian tanah yang dilakukan Nabi Muhammad SAW seperti yang diungkapkan oleh Abu Ubaid dalam Kitab Al-Amwal, yaitu Ibnu Sirin pernah mengatakan bahwa Rasulullah telah mengapling tanah kepada seorang lelaki dari kalangan Anshar yang bernama Sulaith. Selanjutnya juga pemberian tanah kepada Zubair ra sebagaimana hadist yang disampaikan dari Asma' binti Abu Bakar ra bahwa Rasulullah SAW telah memberikan kapling tanah kepada Az-Zubair ra di Khaibar, yang di dalamnya terdapat pepohonan dan kebun kurma. Begitupun juga terhadap Abu Tsalabah al-Khusyani ra, Rasulullah SAW memberikan tanah kepadanya dengan menyertai dengan surat pengkaplingan tanah.

Kebijakan pemberian tanah juga dilakukan Nabi Muhammad saw kepada orang-orang yang baru masuk Islam. Seperti yang dilakukan Rasulullah saw terhadap pemuka Bani Hanifah, Mujja'ah Al-Yamamah. Kepada Rasulullah SAW menulis sebuah Surat keterangan pemberian tanah, yang berbunyi:

*“Dengan menyebut Nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ini adalah surat keterangan yang telah ditulis Muhammad Rasulullah kepada Mujja'ah bin Murarah bin Sulma. Sesungguhnya aku telah memberikan sekapling tanah kepadamu di Daerah Ghaurah, Ghurabah, dan Hubul. Barang siapa yang mempersoalkan masalah ini kepadamu, maka datanglah menghadap kepadaku”.*



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Melalui riwayat-riwayat tersebut, berarti telah menunjukkan bahwa Rasulullah SAW melakukan tindakan atas kondisi umat Islam yang tidak mempunyai tanah dengan memberinya tanah, supaya dengan tanah itu mereka dapat tinggal dan mengolahnya untuk kehidupannya. Sedangkan untuk orang-orang yang baru masuk Islam, Nabi Muhammad SAW melakukannya sebagai upaya agar menguatkan hati dan keimanan mereka pada Islam, karena mereka adalah golongan yang rentan baik dari segi iman maupun ekonomi (*Ibid*, hlm. 366).

Selain itu, Rasulullah SAW juga telah memutuskan permasalahan seputar pertanahan. Di antaranya persengketaan yang terjadi antar seorang lelaki yang telah menanam pohon kurma di atas tanah milik seorang lelaki Anshar yang berasal dari Bani Bayadh. Akhirnya Rasulullah SAW memutuskan agar lelaki pemilik tanah tetap mengambil tanahnya. Sementara Rasulullah saw memutuskan agar lelaki yang menanam pohon kurma di atas tanah orang lain untuk mencabut pohon kurma yang telah ditanamnya. Sebagaimana hadist, dari Hisyam bin Urwah ra dari ayahnya bahwa Rasulullah SAW bersabda, *“Barang siapa yang mengelola tanah kosong (mawat), maka hal tersebut telah menjadi hak kepemilikannya dan tidak ada hak bagi pelaku kezaliman untuk mengambil dan merampasnya”*. Dalam hadist lain, dari Rafi’ bin Khudaij dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, *“Barang siapa yang bercocok tanam pada tanah orang lain tanpa sepengetahuan dan izin mereka, maka pemilik tanah berhak membiayai tanaman itu. Sementara penanam tidak ada*





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

hak untuk mendapatkan hasil dari tanaman yang telah diusahakannya”. (Ibid, hlm. 372).

Dari hadist tersebut, maka ada dua pendapat yaitu, Nabi Muhammad SAW tidak membolehkan penanam mengambil dan memetik hasil dari usahanya selain dari biaya yang telah dikeluarkannya terhadap tanaman tersebut. Di sisi lain, terhadap pemilik tanah supaya memberikan ganti rugi atas biaya yang telah dikeluarkan si penanam, sehingga hasil tanaman itu menjadi hak pemilik tanah secara keseluruhan dan dengan cara yang halal lagi baik.

Di tengah-tengah fenomena penguasaan tanah oleh individu yang lahir dari pemberian tanah maupun pengolahan tanah kosong, maka Rasulullah saw menetapkan tanah larangan (*hima*) yang digunakan untuk kepentingan umum. Hal itu dilakukan untuk menjaga kestabilan ekonomi umat Islam dan menghindari ketimpangan dalam penguasaan dan pemilikan tanah. Beberapa hadist Rasulullah saw mengenai *himayaitu*, Rasulullah saw bersabda,

“Tidak ada penjagaan dan pembelaan hima, terkecuali bagi Allah dan Rasul-Nya”.

Abu Ubaid juga meriwayatkan hadist dari Hibban bi Zaid asy-Syar’abi ra dari seorang lelaki dari kalangan Muhajirin ia berkata,

“aku telah bersahabat dengan Rasulullah selama tiga tahun, kemudian aku dengar dia berkata ‘Seluruh umat manusia mendapatkan hak yang sama di dalam air, padang rumput, dan api.’”

Selanjutnya Rasulullah SAW bersabda,



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

*“Barang siapa yang melarang memanfaatkan kelebihan air dari keperluannya dengan tujuan untuk mencegah pemanfaatan padang rumput yang lebih dari kebutuhannya, maka Allah akan melarang dan mencegahnya dari karunia-Nya pada hari kiamat.”*

Abu Ubaid menambahkan bahwa Iyas bin abdin ra berkata,

*“Rasulullah telah melarang pencegahan pemberian dan pemanfaatan yang di luar kebutuhannya”.*

Konsep penting yang dapat diambil dari hadist-hadist tersebut adalah bahwa Rasulullah saw menetapkan *hima* atas air, padang rumput, dan api.

Ketiganya itu merupakan sumber publik atau sumber penghidupan orang banyak, dimana setiap orang mempunyai hak terhadapnya. Oleh karenanya, Rasulullah saw melarang melakukan privatisasi terhadap ketiganya, dengan alasan agar masyarakat banyak tidak terzalimi. Hal itu terbukti dari sebuah riwayat, yaitu Abyadh bin Hammal al-mazini ra pernah meminta aliran air yang selalu mengalir di daerah Ma'arab (sebuah negeri di Yaman) kepada Rasulullah SAW, lalu Rasulullah SAW memberikan aliran air itu kepadanya. Pemberian itu dilakukan berdasarkan alasan bahwa tanah itu merupakan lahan mati (*mawat*) yang telah dikelolanya. Kemudian Rasulullah saw mengetahui bahwa aliran air yang dimintanya tersebut merupakan aliran yang deras dengan potensi air yang tidak akan pernah putus, maka beliau meminta supaya Abyadh mengembalikan pemberiannya itu. (*Ibid*, hlm. 381-382).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Masa Shahabat Khulafaurraasyidiin

1. Abu Bakar Asshiddiq RA

Abu Ubaid Al-Qasim, (2006). Kepemimpinan Abu Bakar ra ini sangat terbuka dengan kritik sebagaimana isi pidato pertamanya sebagai khalifah. Hal itu terlihat ketika beliau memberikan tanah kepada Thalhah bin Ubaidillah ra, dan menuliskan surat mengenai pengaplingan tanah tersebut kepadanya, namun ternyata Umar bin Khattab ra tidak setuju dengan Abu Bakar ra. Umar bin Khattab ra yang saat itu sebagai saksi, menolak untuk memberikan stempel pada surat tersebut, karena Umar bin Khattab ra berpendapat hal tersebut tidak adil terhadap kaum muslimin lainnya. Umar bin Khattab ra merasa hal tersebut tidak adil karena jumlah kaum muslimin terus bertambah, pemberian tanah dalam luas yang besar kuranglah tepat, karena lebih baik tanah tersebut dimanfaatkan bersama kaum muslimin daripada dinikmati sendiri oleh Thalhah ra. Hal serupa juga terjadi terhadap Uyainah bin Hisn sebagaimana riwayat dari Abudurrahman bi Yazid bin Jabir bahwa Abu Bakar ra telah mengkaplingkan tanah kepada Uyainah bin Hisn, dan beliau juga telah menuliskan surat mengenai hal itu. Lalu Uyainah datang kepada Umar bin Khattab ra untuk dibacakan surat, namun Umar bin Khattab ra juga menolak surat tersebut dengan meludahi dan menghapusnya. Kemudian Uyainah datang kembali kepada Abu Bakar ra dengan memohon agar memperbarui surat tersebut, lalu Abu Bakar ra berkata, “Demi Allah, aku



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak akan memperbarui sesuatu yang telah ditolak oleh Umar Ibnul Khattab”.

#### 2. Umar bin Khatthab RA

Jaribah Al-Haritsi, (2006).Salah satu contoh yaitu ketika kaum muslimin berselisih dalam pembagian tanah di Irak dan Syam. Kaum muslimin menghendaki agar tanah taklukan itu diberikan kepada mereka. Akan tetapi, Umar bin Khattab ra berpendapat untuk tidak membagikan tanah itu. Umar bin Khattab ra berkata, “Jika tanah Irak dan Syam serta hasilnya dibagikan, maka apa yang akan digunakan untuk menutup benteng, dan apa yang menjadi milik anak cucu serta kaum janda di daerah ini dan orang yang di luar Irak dan Syam?”

Untuk memutuskan permasalahan itu, Umar bin Khattab ra bermusyawarah dengan kaum muhajirin generasi pertama. Utsman bin Affan ra, Ali bin Abi Thalib ra, dan Thalhah ra sependapat dengan Umar, sedangkan Abdurrahman bin Auf ra menginginkan agar tanah tersebut dibagi kepada kaum muslimin. Oleh karena belum dicapai kesepakatan, maka Umar bin Khattab ra mendatangkan sepuluh orang kaum Anshar, masing-masing lima orang dari suku Khazraj dan Aus. Di hadapan kaum Anshar Umar bin Khattab ra menyampaikan pertimbangannya untuk tidak membagikan tanah itu. Umar bin Khattab ra beralasan bahwa Syam, Jazirah Arab, Kufah, Basrah, dan Mesir harus dijaga oleh pasukan dan perlu dana untuk membiayainya. Umar bin Khattab ra berkata, “Lalu dari manakah mereka harus diberikan, jika bumi dan hasilnya dibagikan?”

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Demikian, maka kaum Anshar sependapat dengan Umar dan akhirnya Umar bin Khattab ra menunjuk Utsman bin Hanif ra sebagai pejabat urusan tanah di Irak. Dengan demikian, Umar bin Khattab ra memutuskan untuk tidak membagi tanah taklukan yang terletak di Irak dan Syam. Keputusan Umar bin Khattab ra tersebut didasarkan pada *ijtihad* bersama para sahabat.

Seiring dengan penolakan Umar bin Khattab ra atas pembagian tanah taklukan, Umar sangat tidak menginginkan pemilikan lahan dalam jumlah yang luas. Di antara contoh hal itu, bahwa Umar menulis surat untuk Jarir ra kepada Utsman bin Hanif ra, yang di dalamnya disebutkan, “maka aku memutuskan tanah untuk Jarir bin Abdullah ra sesuai kadar yang mencukupi kebutuhan pokoknya, tidak kurang dan tidak lebih!” Begitu pun halnya dengan perkataan Umar bin Khattab ra kepada Bilal bin Harits ra ketika menarik darinya tanah di Al-Aqiq yang tidak mampu dikelolanya, “Sesungguhnya kamu mengetahui bahwa Rasulullah saw tidak pernah menolak sesuatu pun yang diminta kepada beliau, dan kamu meminta kepada beliau Al-Aqiq, lalu beliau memberikannya kepadamu. Sebab manusia ketika waktu itu sedikit, dan tidak ada kebutuhan bagi mereka, namun sekarang penduduk Islam telah banyak dan mereka membutuhkannya!”

## 2.8 Definisi Konsep

1. PRONA adalah singkatan dari Proyek Operasi Nasional Agraria. PRONA diatur dalam Kepmendagri No. 189 Tahun 1981 tentang Proyek Operasi

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Nasional Agraria, dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2015 tentang Program Nasional Agraria (PRONA).

2. Implementasi atau pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan.
3. Penyuluhan, A.W. Van den Ban (1999) dituliskan bahwa penyuluhan merupakan keterlibatan seseorang untuk melakukan komunikasi informasi secara sadar dengan tujuan membantu sesamanya memberikan pendapat sehingga bisa membuat keputusan yang benar.
4. Sertifikat Hak Milik (SHM) adalah jenis sertifikat dengan kepemilikan hak penuh atas lahan atau tanah oleh pemegang sertifikat tersebut. SHM juga menjadi bukti kepemilikan paling kuat atas lahan atau tanah yang bersangkutan karena tidak ada lagi campur tangan ataupun kemungkinan kepemilikan oleh pihak lain.

UIN SUSKA RIAU



## 2.9 Konsep Operasional

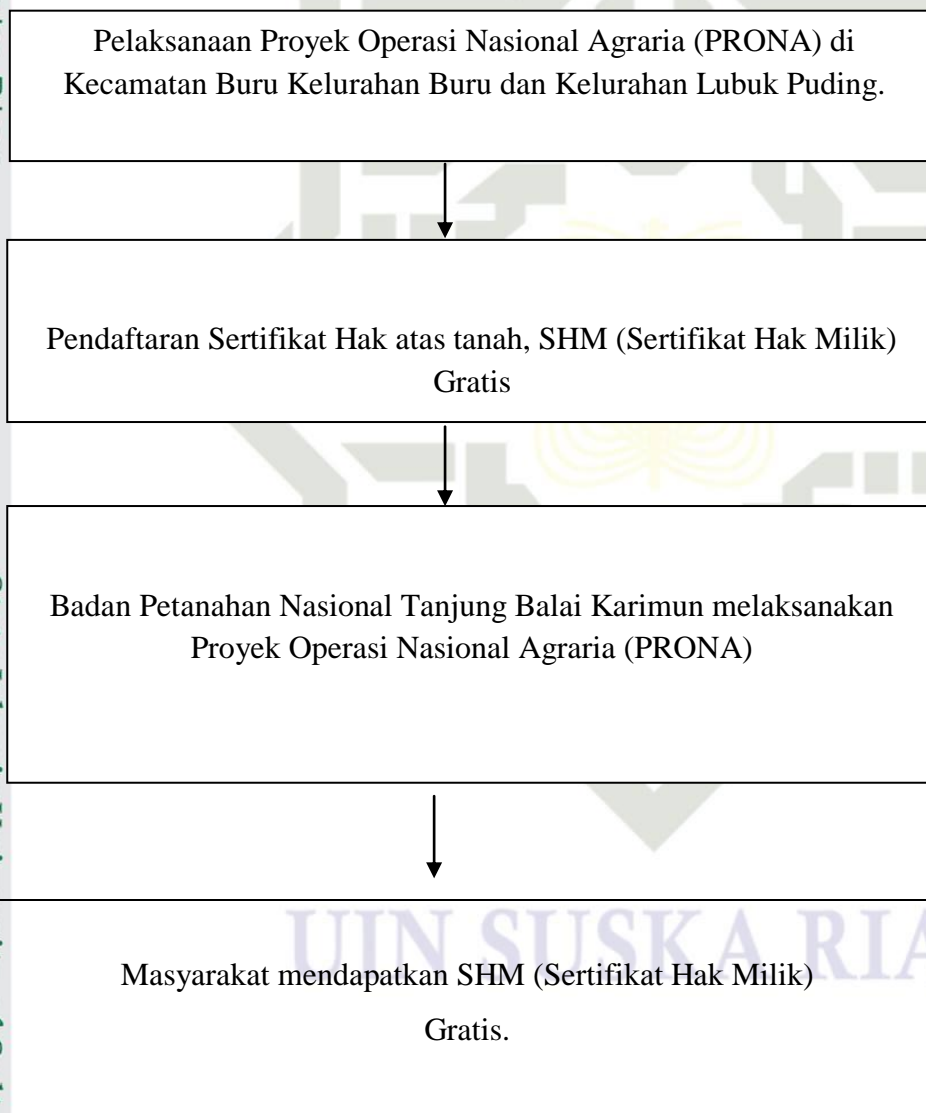
Konsep	Indikator	Sub Indikator
Pelaksanaan Proyek Operasi Nasional Agraria PRONA	1. Penetapan Lokasi	1. Kepala Kantor Pertanahan Tanjung Balai Karimun menetapkan lokasi kegiatan PRONA di wilayah kerjanya dan mengajukan ke Kantor Wilayah Provinsi Kepulauan Riau. 2. Terdiri dari kelurahan Buru dan Kelurahan Lubuk Puding Kecamatan Buru.
	2. Penyuluhan	1. Penyuluhan dilakukan oleh Kantor Pertanahan Tanjung Balai Karimun di Kelurahan Buru dan Kelurahan Lubuk Puding Kecamatan Buru. 2. Penyuluhan dilakukan dengan memberikan penjelasan mengenai PRONA.
	3. Pengumpulan data/ alat bukti/ alas hak	1. Masyarakat mengumpulkan persyaratan PRONA ke loket/ posko yang telah disiapkan. 2. Pengurusan kelengkapan berkas masyarakat yang kurang dilakukan oleh masyarakat dibantu oleh aparatur desa dan panitia PRONA Kantor Pertanahan Tanjung Balai Karimun.
	4. Pengukuran Bidang Tanah	1. Pengukuran dilakukan oleh Satgas Fisik Kantor Pertanahan Tanjung Balai Karimun.
	5. Pemeriksaan Tanah	1. Pemeriksaan tanah dilakukan oleh panitia PRONA Kantor Pertanahan Tanjung Balai Karimun.
	6. Penerbitan Sertifikat	1. Bidang tanah dengan data fisik dan yuridis yang sudah memenuhi syarat.

Sumber: Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Program Nasional Agraria



## 2.10 Kerangka Berfikir

Adapun kerangka pemikiran dari penelitian mengenai Evaluasi Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) Pada Badan Pertanahan Nasional Tanjung Balai Karimun di Kecamatan Buru Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2015 tentang Program Nasional Agraria (PRONA)



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Buru, Kelurahan Buru dan Kelurahan Lubuk Puding, Badan Pertanahan Nasional menetapkan Kecamatan Buru, Kelurahan Buru dan Kelurahan Lubuk Puding sebagai lokasi dilaksanakannya Proyek Operasi Nasional (PRONA) dikarenakan sesuai dengan kriteria lokasi dan tujuan PRONA yaitu wilayah yang belum bersertifikat dan masyarakat menengah ke bawah, dikarenakan pada Kecamatan Buru Kelurahan Buru dan Kelurahan Lubuk Puding rata-rata masyarakatnya bekerja sebagai petani dan nelayan tradisional, serta pada kantor yang berwenang dalam melaksanakan Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) yaitu Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karimun.

#### 3.2 Jenis Data dan Sumber Data

##### a) Sumber data primer

Data yang diperoleh berupa informasi langsung dari informan melalui wawancara yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang diteliti, yaitu :Evaluasi Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) Pada Badan Pertanahan Nasional Tanjung Balai Karimun Di Kecamatan Buru Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau.

##### b) Sumber data sekunder

Data yang diperoleh untuk melengkapi data primer yang didapatkan, seperti :





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1 Dasar-dasar Hukum mengenai Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) yang dilaksanakan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional di Kecamatan Buru, Kelurahan Buru dan Kelurahan Lubuk Puding.
- 2 Daftar nama-nama peserta yang mengikuti kegiatan Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) di Kelurahan Buru dan Kelurahan Lubuk Puding.

### 3.3 Informan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan informan penelitian melalui *key person*. Adapun yang menjadi informan kunci (*key informan*) dalam penelitian ini adalah Pegawai Kantor Badan Pertanahan Nasional Tanjung Balai Karimun Kepulauan Riau. Untuk memperoleh informasi tersebut, peneliti menggunakan teknik *Snowball Sampling*. *Snowball Sampling* merupakan teknik pengambilan sample dimana peneliti merasa cukup dengan informasi yang dibutuhkan.

**Tabel 3.1**

#### **Key Informan Penelitian**

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Yahya	Kepala Sub. Seksi Penetapan Hak Tanah	
2	Muhammad Rizal Arya Eka Putra Harahap	Penetapan Hak Tanah	
3	Julian Syahpoetra S.I.Kom	Penataan Pertanahan	
4	Novie Sasmitha SE,	Penetapan Hak Tanah	
	Rudy Rukman	Lurah Buru	
	Raja Buntat Abbas	Masyarakat	
Jumlah			



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3.4 Teknik Pengumpulan Data

Pengambilan data adalah tata cara atau teknik pencarian data, yang berasal dari sumber atau objek penelitian sebagai berikut:

- a. Wawancara mendalam ialah pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara langsung terhadap responden mengenai PRONA di Kelurahan Buru dan Kelurahan Lubuk Puding Kecamatan Buru Kabupaten Karimun.
- b. Observasi yaitu dengan melakukan pengamatan langsung ke lokasi penelitian untuk mengetahui pelaksanaan PRONA di Kelurahan Buru dan Kelurahan Lubuk Puding Kecamatan Buru Kabupaten Karimun.

### 3.5 Analisis Data

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikan kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar (moleong, lexy j. 2000).

Metode yang digunakan didalam penelitian ini yaitu metode kualitatif. Dimana metode yang digunakan untuk menganalisis dan menyusun argumentasi dengan cara mendeskripsikan, membandingkan, menginterpretasikan data dan fakta yang ditemukan dilapangan.

Analisis data dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data. Langkah yang digunakan dalam analisis data adalah sebagai berikut:

#### 1. Reduksi Data

Dalam tahap ini proses pengumpulan informasi dilakukan dengan menggunakan alat-alat yang diperlukan, seperti rakaman MP3, *field note* (catatan lapangan), dan observasi selama berada dilokasi penelitian. Pada tahap ini juga



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

selanjutnya dilakukan proses seleksi, penyederhanaan, pemfokusan dan pengabstraksian data. Proses ini berlangsung selama penelitian dilakukan dengan membuat kategorisasi, memusatkan tema, serta menentukan batas-batas permasalahan. Reduksi data seperti ini diperlukan sebagai analisis awal yang akan menyeleksi data yang diperoleh, mempertegas serta membuat fokus untuk menghasilkan sebuah kesimpulan.

Tahap selanjutnya, hasil wawancara, catatan lapangan, dan hasil pengamatan lainnya akan dituliskan lebih teratur dan sistematis. Hal ini untuk memudahkan penulis membaca dan mencermati data secara keseluruhan. Selain itu, juga memudahkan proses selanjutnya, yakni pengkategorisasian data dalam bentuk lebih sederhana sesuai dengan kebutuhan penelitian. Pada tahap selanjutnya, penulis akan melakukan proses triangulasi (*check and recheck*) informasi antara satu sumber dengan sumber lainnya. Hal ini dilakukan untuk memastikan keabsahan (*validity*) data.

#### 2. Sajian Data

Sajian data merupakan suatu susunan informasi yang memungkinkan kesimpulan penelitian dilakukan, dengan melihat sajian data, penulis dapat lebih memahami berbagai hal yang terjadi dan memungkinkan untuk mengerjakan sesuatu pada analisis ataupun tindakan lain berdasarkan pemahaman tersebut. Sajian data diperoleh dari hasil interpretasi, usaha memahami, dan analisis secara mendalam terhadap data yang telah direduksi dan dikategorisasikan.



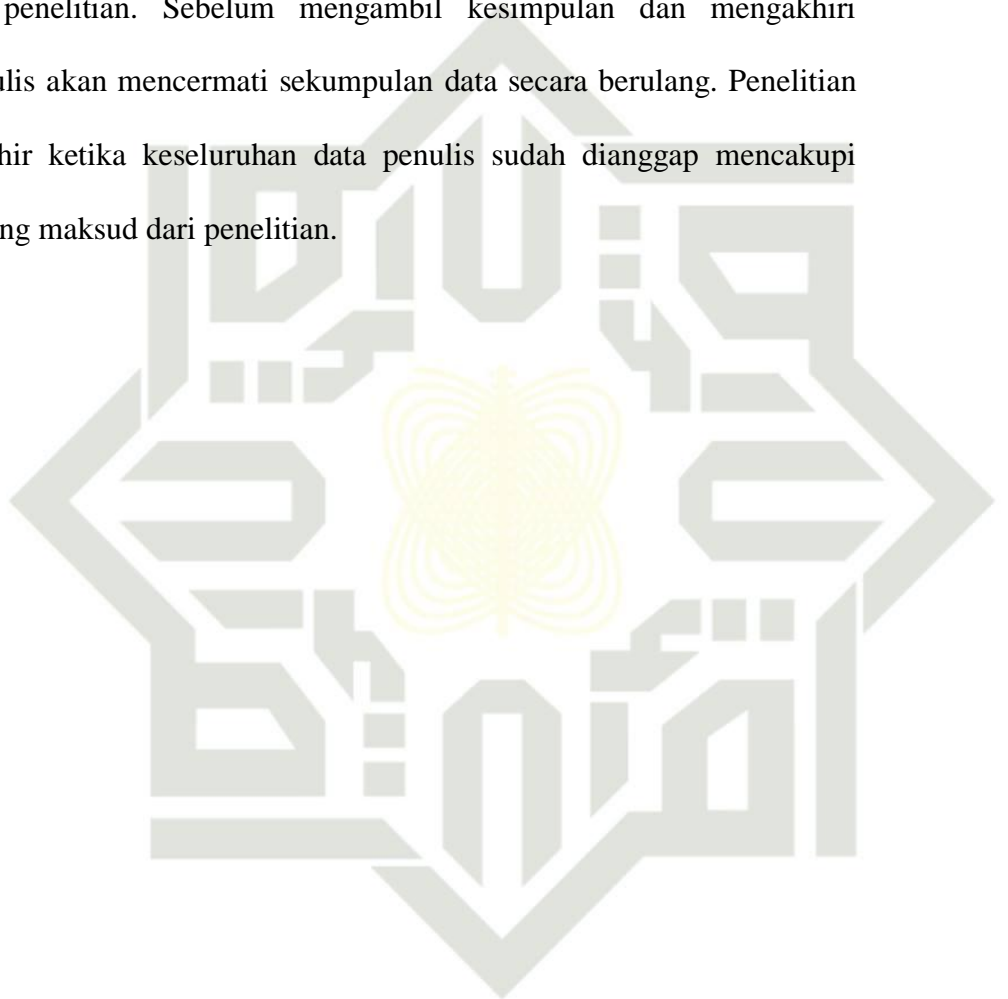


#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Penyimpulan Akhir

Dari proses pengumpulan data sebagaimana kebutuhan dalam penelitian ini dan masih menjadi kesimpulan sementara, selanjutnya akan dicermati dan dikomentari oleh penulis untuk mendeskripsikan serta menarik kesimpulan sebagai hasil penelitian. Sebelum mengambil kesimpulan dan mengakhiri penelitian, penulis akan mencermati sekumpulan data secara berulang. Penelitian ini akan berakhir ketika keseluruhan data penulis sudah dianggap mencakupi untuk mendukung maksud dari penelitian.



UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### 4.1 Sejarah Kabupaten Karimun

Dahulu, Karimun berada di bawah kekuasaan kerajaan Sriwijaya hingga keruntuhannya pada abad ke-13, dan pada masa itu pengaruh agama Budha mulai masuk. Hal ini dibuktikan dengan adanya Prasasti di Desa Pasir Panjang. Pada masa itu disebutkan Karimun sering dilalui kapal-kapal dagang hingga pengaruh Kerajaan Malaka (Islam) mulai masuk tahun 1414. Pada tahun 1511 Malaka jatuh ke tangan Portugis, saat itu Sultan Mansyur Syah yang memerintah memberi larangan pada keturunan raja-raja untuk tinggal di Malaka, dan mendirikan kerajaan-kerajaan kecil, lalu muncullah kerajaan Indrasakti, Indrapura, Indragiri, dan Indrapuri. Sementara itu banyak rakyat Malaka yang tinggal berpencar di pulau-pulau yang berada di Kepulauan Riau termasuk Pulau Karimun. Sejak kejatuhan Malaka dan digantikan perannya oleh kerajaan Johor, Karimun dijadikan basis kekuatan angkatan laut untuk menentang Portugis sejak masa pemerintahan Sultan Mahmud Syah I (1518-1521) hingga Sultan Ala Jala Abdul Jalil Ri'ayat Syah (1559-1591). Pada kurun waktu 1722-1784, Karimun berada dalam kekuasaan Kerajaan Riau-Lingga dan pada masa itu daerah Karimun, terutama Kunder dikenal sebagai penghasil gambir dan penghasil tambang (seperti : timah, granit, dll) dan Karimun berkembang menjadi daerah perdagangan serta mencapai kejayaan pada masa pemerintahan Raja Ali Haji. Jauh sebelum ditandatanganinya Treaty of London, Kerajaan Riau-Lingga dan Kerajaan Melayu dilebur menjadi satu sehingga semakin kuat dengan wilayah



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kekuasaan meliputi Kepulauan Riau, daerah Johor dan Malaka (Malaysia), Singapura dan sebagian kecil wilayah Indragiri Hilir. Setelah Sultan Riau meninggal pada tahun 1911, Pemerintah Hindia Belanda menempatkan amir-amirnya sebagai District Thoarden untuk daerah yang besar dan Onder District Thoarden untuk daerah yang agak kecil. Pemerintah Hindia Belanda akhirnya menyatukan wilayah Riau-Lingga dengan Indragiri untuk dijadikan sebuah karesidenan yang dibagi menjadi 2 (dua) Afdelling, yaitu : Afdelling Tanjungpinang dan Afdelling Indragiri. Berdasarkan Surat Keputusan delegasi Republik Indonesia, provinsi Sumatera Tengah tanggal 18 Mei 1950 No. 9/Deprt. menggabungkan diri ke dalam Republik Indonesia dan Kepulauan Riau diberi status daerah Otonom Tingkat II yang dikepalai oleh Bupati sebagai kepala daerah dengan membawahi 4 (empat) kawedanan sebagai berikut :

1. Kawedanan Tanjungpinang meliputi wilayah Kecamatan Bintan Selatan
2. Kawedanan Karimun meliputi wilayah Kecamatan Karimun, Kundur dan Moro
3. Kawedanan Lingga meliputi wilayah Kecamatan Lingga, Singkep dan Senayang
4. Kawedanan Pulau Tujuh meliputi wilayah Kecamatan Jemaja, Siantan, Midai, Serasan, Tambelan, Bunguran Barat dan Bunguran Timur

Kemudian berdasarkan Surat Keputusan No. 26/K/1965 dengan mempedomani Instruksi Gubernur Riau tanggal 10 Februari 1964 No. 524/A/1964 dan Instruksi No. 16/V/1964 dan Surat Keputusan Gubernur Riau tanggal 9 Agustus 1964 No. UP/247/5/1965, tanggal 15 November 1965 No.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UP/256/5/1965 menetapkan terhitung mulai 1 Januari 1966 semua daerah Administratif kawedanan dalam kabupaten Kepulauan Riau dihapuskan.

Pada tahun 1999, berdasarkan UU No. 53 Tahun 1999 Kabupaten Kepulauan Riau dimekarkan menjadi 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Kepulauan Riau, Kabupaten Karimun, dan Kabupaten Natuna. Akhirnya, Karimun diresmikan sebagai kabupaten yang berdiri sendiri dengan terdiri dari 3 (tiga) wilayah kecamatan, 6 (enam) kelurahan, dan 24 (dua puluh empat) desa.

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2001, Kabupaten Karimun dimekarkan menjadi 7 (tujuh) wilayah kecamatan dengan 19 (sembilan belas) kelurahan dan 25 (dua puluh lima) desa. Setelah itu Karimun mengalami pemekaran menjadi 9 kecamatan dengan 22 (duapuluh dua) kelurahan dan 32 (tigapuluh dua) desa.

Kemudian pada Tahun 2012, berdasarkan Perda No. 02 Tahun 2012, bulan Juli 2012, wilayah Kabupaten Karimun kembali mekar menjadi 12 (dua belas) kecamatan, dengan 42 (empat puluh dua) desa dan 29 (dua puluh sembilan) kelurahan

#### 4.2 Visi dan Misi Kabupaten Karimun

Visi :

Visi pembangunan Kabupaten Karimun untuk jangka waktu 2011-2016 adalah sebagai berikut:

“Terwujudnya Kabupaten Karimun yang Maju dan Berdaya Saing Berlandaskan Iman dan Taqwa”

Misi :



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Misi pembangunan Kabupaten Karimun untuk jangka waktu 2011-2016 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan dan pemeratakan ketersediaan infrastruktur daerah yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan pelayanan masyarakat;
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya guna berlandaskan iman dan taqwa;
3. Mengembangkan pusat pertumbuhan ekonomi yang terpadu dengan ekonomi berbasis kerakyatan;
4. Memaksimalkan kualitas pelayanan publik; dan

Mengelola sumber daya kelautan dan pulau-pulau kecil secara terpadu dan berkelanjutan.

Berdasarkan visi dan misi tersebut, Bupati Kabupaten Karimun mempunyai MOTTO sebagai berikut:

1. Kerja Amanah
2. Kerja Keras
3. Kerja Cerdas
- 4 (empat) Azam sebagai motor penggerak pembangunan yaitu:
  1. Azam Peningkatan Iman dan Taqwa.
  2. Azam Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.
  3. Azam Pembangunan Ekonomi yang berdimensi Kerakyatan.
  4. Azam Pengembangan Seni dan Budaya



#### 4.3 Letak dan Kondisi Geografis

Kabupaten Karimun terletak pada koordinat 00°24'36" LU sampai 01°13'12" LU dan 103°13'12" BT sampai 104°00'36" BT dengan wilayah laut yang berada dalam batas wilayah empat mil yang diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1983.

Kabupaten Karimun termasuk ke dalam wilayah yang sangat strategis untuk pengembangan kegiatan ekonomi. Letaknya berbatasan langsung dengan dua negara tetangga, yakni Malaysia dan Singapura, serta hanya disatukan dengan perairan Selat Singapura (*Phillip channel*). Selain itu, wilayah administrasi Kabupaten Karimun berbatasan dengan Kota Batam, sebagian Kepulauan Riau dan sebagian wilayah Provinsi Riau. Berdasarkan aspek geostrategisnya, maka Kabupaten Karimun menjadi salah satu dari empat kabupaten yang sebagian wilayahnya ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB atau *Free Trade Zone/FTZ*). Tiga kawasan KPBPB lainnya adalah Sabang, Bintan, dan Batam.

Batas-batas Kabupaten Karimun, yaitu:

- Utara : Selat Singapura (*Philip Channel*), Selat Malaka dan Semenanjung Malaysia.
- Selatan : Kecamatan Kateman (Kabupaten Indragiri Hilir) dan Kabupaten Lingga.

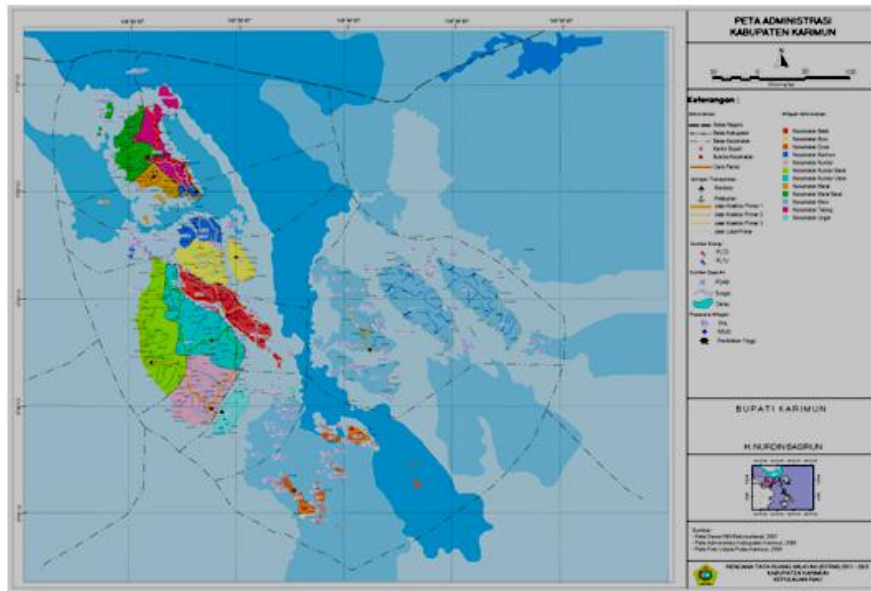


## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Barat : Kecamatan Tebing Tinggi (Kabupaten Bengkalis) dan Kecamatan Kuala Kampar (Kabupaten Pelalawan).

Timur : Kecamatan Belakang Padang (Kota Batam).



Gambar 1.1. Peta Administrasi Kabupaten Karimun

Sumber: Dokumen Rancangan RTRW Kabupaten Karimun 2018

Secara administratif Kabupaten Karimun terdiri dari 12 (dua belas) Kecamatan, 29 Kelurahan dan 42 Desa, dengan ibukota kabupaten terletak dianjung Balai Kecamatan Karimun. Pembagian wilayah administrasi hingga unit desa/kelurahan dapat dilihat pada Tabel 4.1 sebagai berikut:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 4.1**

**Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Karimun Tahun 2018**

NO	WILAYAH ADMINISTRASI	IBUKOTA KECAMATAN	JUMLAH				JUMLAH PULAU
			KELURAHAN	DESA	RW	RT	
1	Moro	Moro	2	10	49	139	84
2	Kundur Utara	Tanjung Berlian	1	4	43	93	11
3	Kundur Barat	Sawang	1	4	44	111	24
4	Karimun	Tanjung Balai	6	3	39	139	23
5	Buru	Buru	2	2	29	64	6
6	Meral	Meral	6	–	30	119	24
7	Tebing	Tebing	5	1	24	73	5
8	Meral Barat	Darussalam	2	2	19	55	–
9	Belat	Sebele	–	6	28	65	–
10	Ungar	Sei. Buluh	1	3	23	47	–
11	Durai	Durai	–	4	13	36	46
12	Kundur	Tanjung Batu	3	3	51	145	26
JUMLAH			29	42	392	1086	249

Sumber: *Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2018*

#### 4.4 Luas wilayah

Luas wilayah Kabupaten Karimun adalah 7.984 Km<sup>2</sup> yang terdiri dari 1.524 Km<sup>2</sup> luas daratan dan 6.460 Km<sup>2</sup> luas lautan. Kecamatan Moro merupakan wilayah terbesar dengan total wilayah sebesar 2.835,24 Km<sup>2</sup> atau 35,51%. Secara umum Kabupaten Karimun mempunyai dataran yang datar dan landai dengan ketinggian antara 2 sampai 500 Meter dari permukaan laut. Namun ada juga bagian yang berbukit-bukit dengan kemiringan sampai 40° serta ketinggian antara 20 sampai 500 meter. Di Karimun terdapat sebuah gunung yaitu



Gunung Jantan dengan ketinggian 478 meter dan merupakan salah satu sumber mata air di Karimun. Disamping itu pada beberapa pulau di wilayah Kabupaten Karimun terdapat rawa-rawa, dan dilihat dari keberadaan potensi wilayahnya maka wilayah laut (perairan) Kabupaten Karimun merupakan perairan yang strategis karena sebagian wilayahnya berada pada selat malaka.

Tabel 4.2

## Luas Wilayah Kabupaten Karimun per-Kecamatan

Nama Kecamatan	Luas Wilayah			
	Administrasi		Terbangun	
	(Ha)	(%) terhadap total	(Ha)	(%) terhadap total
<b>Moro</b>	24.073	25,84	23	6.30
<b>Kundur</b>	8.785	9,43	42	11.51
<b>Karimun</b>	3.625	3,89	71	19.45
<b>Meral</b>	2.535	2,72	56	15.34
<b>Tebing</b>	5.171	5,55	33	9.04
<b>Buru</b>	6.646	7,13	13	3.56
<b>Kundur Utara</b>	9.391	10,08	16	4.38
<b>Kundur Barat</b>	13.237	14,21	22	6.03
<b>Durai</b>	3.571	3,83	8	2.19
<b>Meral Barat</b>	5.600	6,01	34	9.32
<b>Ungar</b>	3.658	3,93	23	6.30
<b>Belat</b>	6.865	7,37	24	6.58
<b>Total</b>	<b>93.157</b>	<b>100</b>	<b>365</b>	<b>100</b>

Sumber: Buku Putih Sanitasi Kabupaten Karimun Tahun 2018



**Tabel 4.3**  
**Persebaran dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Karimun**  
**Menurut Kecamatan Tahun 2018**

No.	Kecamatan	Luas Daratan (Ha)	Penduduk*	Kepadatan (Jiwa/Ha)
1	Moro	44.792,39	18.348	41
2	Durai	6.298,27	6.472	103
3	Kundur	8.373,70	29.681	354
4	Kundur Utara	24.564,71	11.751	48
5	Kundur Barat	18.992,39	17.359	91
6	Ungar	5.552,94	6.128	110
7	Belat	10.934,26	6.646	61
8	Karimun	5.976,47	44.666	747
9	Buru	7.339,79	9.462	129
10	Meral	5.785,47	38.831	671
11	Tebing	7.634,60	24.415	320
12	Meral Barat	6.155,02	12.107	197
<b>Jumlah</b>		<b>152.400,00</b>	<b>225.866</b>	<b>1,48</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Karimun Tahun 2018

Jumlah penduduk dipengaruhi oleh kelahiran, kematian dan migrasi. Jumlah penduduk yang besar dengan kualitas yang bagus akan menjadi potensi yang besar untuk memajukan suatu daerah. Dilihat dari tabel dibawah, berdasarkan dari data proyeksi Badan Pusat Statistik Kabupaten Karimun ada

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kenaikan jumlah penduduk tahun 2015 sebanyak 1,01 persen jika dibandingkan dengan Tahun 2014. Pertambahan penduduk Kabupaten Karimun masih pada batas wajar mengingat wilayah Kabupaten Karimun adalah wilayah perbatasan dimana migrasi masuk-keluar cukup tinggi.

Dilihat dari struktur usia penduduk Kabupaten Karimun termasuk umur muda, lebih dari separuh penduduk (54,10 persen) berada pada golongan umur 20-59 tahun. Golongan ini merupakan golongan umur yang sedang aktif bekerja (produktif). Penyediaan lapangan usaha yang sebanyak-banyaknya sangat diperlukan. Golongan umur terbesar kedua adalah umur 5-19 tahun sebanyak 66.091 orang (29,63 persen). Golongan umur ini merupakan golongan usia sekolah sehingga sangat diperlukan fasilitas pendidikan yang cukup dan memadai. Sedangkan untuk golongan umur lebih dari 59 tahun merupakan kelompok umur yang paling sedikit sekitar 6,68 persen dari total penduduk tahun 2015.

**Tabel 4.4**

#### Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Tahun 2017-2018

No	Kelompok Usia	2014	%	2015*	%
1	0 – 4 Tahun	21.446	9.61	21.595	9,59
2	5 – 19 Tahun	66.091	29.62	66.771	29,63
3	20 – 59 Tahun	120.806	54.14	121.886	54,10
4	>59 Tahun	14.774	6.62	15.046	6,68
<b>JUMLAH</b>		<b>223.117</b>	<b>100</b>	<b>225.298</b>	<b>100</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Karimun Tahun 2018

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4.5 Laju Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk adalah besaran persentase perubahan jumlah penduduk disuatu wilayah tertentu pada waktu tertentu dibandingkan dengan jumlah penduduk pada waktu sebelumnya. Angka pertumbuhan penduduk merupakan angka yang menggambarkan penambahan penduduk yang dipengaruhi oleh pertumbuhan alamiah (kelahiran dan kematian) maupun migrasi penduduk. Indikator laju pertumbuhan penduduk berguna untuk melihat kecenderungan dan memproyeksi jumlah penduduk dimasa depan. Angka pertumbuhan penduduk Kabupaten Karimun disajikan pada tabel 1.5 dibawah ini :

**Tabel 4.5**

#### **Angka Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Karimun**

NO	TAHUN	JUMLAH PENDUDUK	ANGKA PERTUMBUHAN PENDUDUK (%)
1	2011	216.146	1,69
2	2012	218.475	1,08
3	2013	220.882	1,10
4	2014	223.117	1,01
5	2015	225.866	1,23

*Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Karimun Tahun 2018*

Tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Karimun mencapai 148 jiwa per Km<sup>2</sup>. Tingkat kepadatan penduduk tertinggi terjadi di Kecamatan Karimun mencapai 747 jiwa per Km<sup>2</sup>. Tingkat kepadatan penduduk terendah di Kabupaten



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Moro sebesar 41 jiwa per Km<sup>2</sup>. Adapun data kepadatan penduduk Kabupaten Karimun Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel 1.6 sebagai berikut :

**Tabel 4.6**

**Tingkat Kepadatan Penduduk Kabupaten Karimun Tahun 2018**

<b>N O</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>JUMLAH PENDUDUK (JIWA)</b>	<b>LUAS (KM<sup>2</sup>)</b>	<b>KEPADATAN PENDUDUK (JIWA/KM<sup>2</sup>)</b>
1	Karimun	44.666	59,76	747
2	Meral	38.831	57,85	671
3	Tebing	24.415	76,35	320
4	Meral Barat	12.107	61,55	197
5	Kundur	29.681	83,74	354
6	Kundur Utara	11.751	245,65	48
7	Kundur Barat	17.359	189,92	91
8	Moro	18.348	447,92	41
9	Durai	6.472	62,98	103
10	Buru	9.462	73,40	129
11	Belat	6.646	109,34	61
12	Ungar	6.128	55,53	110
<b>Jumlah</b>		<b>225.866</b>	<b>1.524</b>	<b>148</b>

*Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Karimun, Tahun 2018*

**4.6 Sejarah Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karimun**

Kabupaten Karimun terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang–Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang–Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

Provinsi Kepulauan Riau merupakan provinsi yang masih relative baru bila dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya. Provinsi Kepulauan Riau dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 dan diresmikan pada tanggal 1 Juli 2004. Provinsi Kepulauan Riau adalah merupakan pemekaran dari Provinsi Riau.

Wilayah Kepulauan Riau berbatasan dengan Negara-negara tetangga dan beberapa provinsi, batas-batas tersebut meliputi:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Negara Vietnam dan Kamboja.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Bangka Belitung dan Jambi
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Negara Singapura, Malaysia, dan Provinsi Riau.
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Negara Malaysia Timur dan Provinsi Kalimantan Barat.

Kepulauan Riau, seluruhnya merupakan wilayah yang memiliki daerah pesisir dan terdiri atas ribuan pulau besar dan kecil. Pada tahun 2007 berdasarkan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

studi yang dilakukan oleh Biro Administrasi Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau bekerjasama dengan Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional pada kegiatan Penamaan Pulau-pulau di Provinsi Kepulauan Riau, jumlah pulau di Provinsi Kepulauan Riau ialah 2.408 pulau. Jumlah pulau tersebut hampir 14% dari seluruh jumlah pulau di Indonesia. Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 78 Tahun 2005 tentang pengelolaan Pulau-pulau Kecil Tertular, dinyatakan bahwa terdapat 19 pulau-pulau kecil terluar di provinsi kepulauan Riau.

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Riau dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 14 Tahun 2006 tanggal 1 Juni 2006 yang berkedudukan di Kota Tanjungpinang dan resmi berdiri sejak dilantiknya Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kepulauan Riau beserta Kepala Bidang dan Kepala Bagian Tata Usaha pada tanggal 21 Juni 2006, Jadi efektif berjalan mulai Tahun Anggaran 2007.

Tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh Kanwil BPN Provinsi Kepulauan Riau mempunyai tugas untuk melaksanakan sebgaiian tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia di Provinsi yang bersangkutan khususnya dalam hal pembinaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pertanahan di lingkungan Provinsi; bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2006 tanggal 01 Juni 2006 telah dibentuk Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Riau, yang berkedudukan di kota Tanjungpinang. Kantor Wilayah ini merupakan pemecahan dari Kantor Wilayah Induk yaitu, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau yang berkedudukan di Pekanbaru.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan Peraturan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan, Kantor Wilayah BPN Provinsi Kepulauan Riau mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional di Provinsi Kepulauan Riau. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Riau mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana, program dan penganggaran dalam rangka pelaksanaan tugas pertanahan.
- b. Pengkoordinasian, pembinaan dan pelaksanaan survey, pengukuran dan pemetaan hak atas tanah dan pendaftaran tanah, pengaturan dan penataan pertanahan, pengendalian pertanahan dan pemberdayaan masyarakat serta pengkajian dan penanganan sengketa konflik pertanahan.
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pertanahan di lingkungan provinsi Kepulauan Riau.
- d. Pengkoordinasian pemangku kepentingan pengguna tanah.
- e. Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan Nasional; (SIMTANAS) di Provinsi Kepulauan Riau.
- f. Pengkoordinasian Penelitian dan pengembangan.
- g. Pengkoordinasian pengembangan sumber daya manusia pertanahan.
- h. Pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, perundang-undangan, serta pelayanan pertanahan.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Disamping itu, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Riau membawahi 7 (tujuh) Kantor Pertanahan, yaitu:

1. Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang.
2. Kantor Pertanahan Kota Batam.
3. Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan.
4. Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun.
5. Kantor Pertanahan Kabupaten Natuna.
6. Kantor Pertanahan Kabupaten Lingga.
7. Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Anambas.

#### 4.7 Visi, dan Misi.

Visi :

Menjadi lembaga yang mampu mewujudkan tanah dan pertanahan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, serta keadilan dan keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan Republik Indonesia.

Misi :

Mengembangkan dan menyelenggarakan politik dan kebijakan pertanahan untuk:

1. Peningkatan kesejahteraan rakyat, penciptaan sumber-sumber baru kemakmuran rakyat, pengangguran kemiskinan dan kesenjangan pendapatan, serta pemantapan ketahanan pangan.
2. Peningkatan tatanan kehidupan bersama yang lebih berkeadilan dan bermartabat dalam kaitannya dengan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T).



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



3. Perwujudan tatanan kehidupan bersama yang harmonis dengan mengatasi berbagai sengketa, konflik, dan perkara pertanahan di seluruh tanah air dan penataan perangkat hukum dan sistem pengelolaan pertanahan sehingga tidak melahirkan sengketa, konflik dan perkara di kemudian hari.
4. Keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan Indonesia dengan memberikan akses seluas-luasnya pada generasi yang akan datang terhadap tanah sebagai sumber kesejahteraan masyarakat. Menguatkan lembaga pertanahan sesuai dengan jiwa, semangat, prinsip, dan aturan yang tertuang dalam UUPA dan aspirasi rakyat secara luas.

#### 4.8 Tugas dan Fungsi Badan Pertanahan Nasional

Badan Pertanahan Nasional mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas, Badan Pertanahan Nasional menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan dan penetapan kebijakan di bidang pertanahan.
2. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang survey, pengukuran, dan pemetaan.
3. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penetapan hak tanah, pendaftaran tanah, dan pemberdayaan masyarakat.
4. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengaturan, penataan dan pengendalian kebijakan pertanahan.
5. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengadaan tanah.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

6. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian dan penanganan sengketa dan perkara pertanahan.
7. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Pertanahan Nasional.
8. Pelaksanaan koordinasi tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Pertanahan Nasional.
9. Pelaksanaan pengelola data informasi lahan pertanian pangan berkelanjutan dan informasi di bidang pertanahan.
10. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pertanahan, dan
11. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pertanahan

UIN SUSKA RIAU

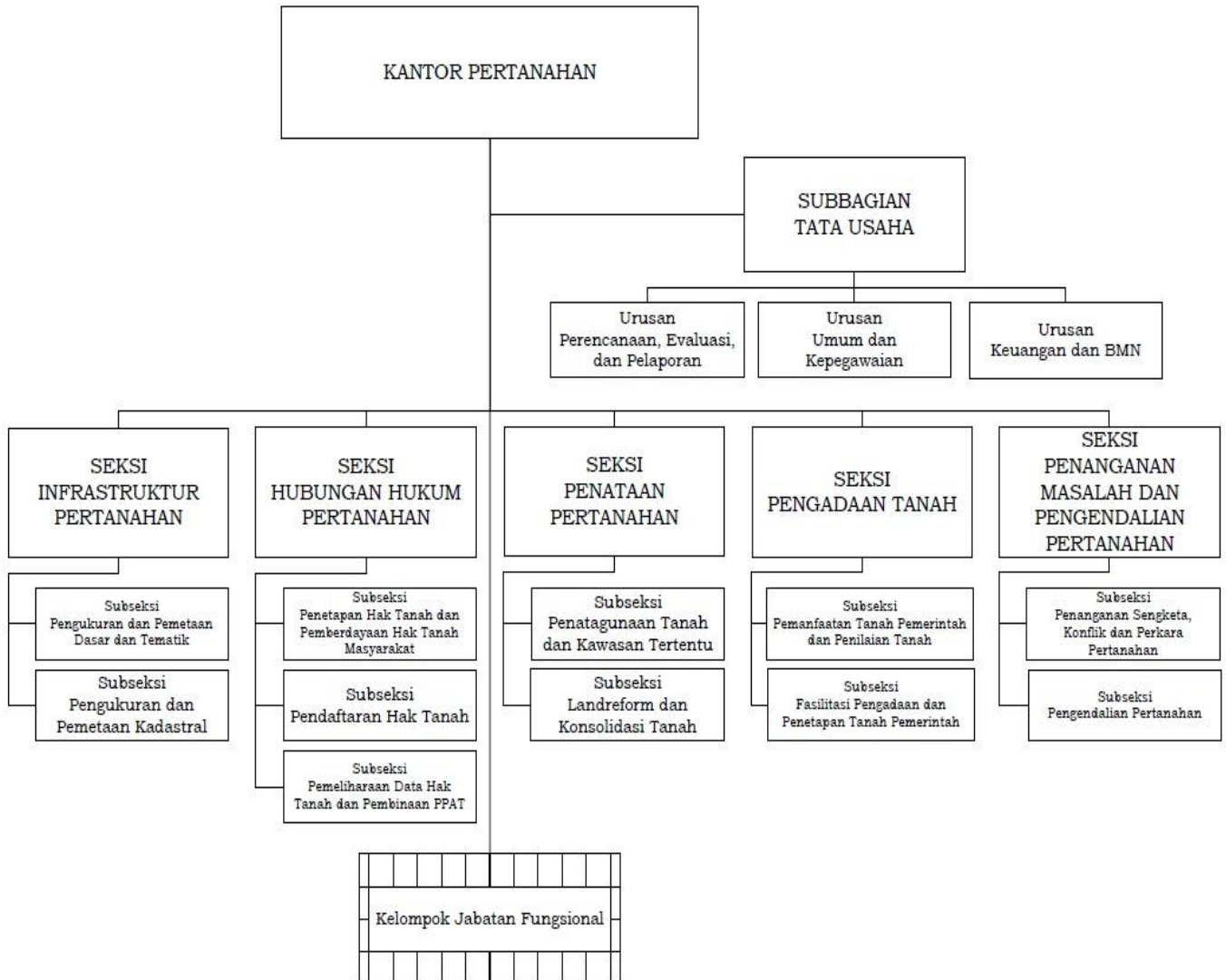


- Hak Cipta D  
1. Dilarang  
a. Pengu  
b. Pengu  
2. Dilarang

© Hak c

#### 4.9 Stuktur Organisasi Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten/Kota

##### BAGAN ORGANISASI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTA



Sumber: Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karimun 2018



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 6.1 Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari hasil penelitian dengan judul Analisis Pelaksanaan Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Tanjung Balai Karimun di Kecamatan Buru Kepulauan Riau adalah sebagai berikut. Badan Pertanahan Nasional Tanjung Balai Karimun bekerjasama dengan kelurahan serta aparat desa setempat untuk merealisasikan program pensertifikatan tanah masyarakat secara gratis yang dinamakan dengan Proyek Operasi Nasional Agraria PRONA yang ditargetkan sebanyak 700 bidang tanah di Kecamatan Buru Kabupaten Karimun Kepulauan Riau. Dalam proses pelaksanaannya masyarakat diminta untuk melengkapi persyaratan-persyaratan guna mengikuti PRONA tersebut seperti fotocopy Surat Tanah, KTP, Kartu Keluarga, PBB, materai 6000, serta Patok batas Sempadan tetapi banyak masyarakat tidak dapat melengkapi beberapa persyaratan dengan itu pihak Desa berperan membantu masyarakat untuk melengkapi beberapa berkas yang dibutuhkan. Lalu dalam pelaksanaannya juga pihak BPN mengalami beberapa kendala seperti alat ukur yang tidak bisa difungsikan dikarenakan sulitnya sinyal GPS serta sinyal Internet di lokasi pelaksanaan, membuat petugas fisik dan yuridis sedikit kesulitan dalam menjalankan tugas, karena hal itu untuk pemasukan data petugas terpaksa membawa pulang kembali ke Kantor berkas-berkas yang telah terkumpul serta SDM yang kurang memadai. Sehingga dari 700 bidang tanah BPN hanya dapat mensertifikatkan tanah masyarakat sebanyak 460 bidang tanah.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam hal ini BPN sudah bisa mengumpulkan masyarakat yang ingin tanahnya disertifikatkan namun karena kelemahan dalam hal teknologi seperti sinyal GPS dan Internet bahkan kurangnya Sumber Daya Manusia (SdM) serta kurangnya strategi BPN dalam pelaksanaan program ini alhasil terdapat 240 bidang tanah masyarakat yang tidak dapat diuruskan sertifikatnya, dan itu merupakan angka yang besar dari 700 bidang tanah yang ditargetkan diawal pelaksanaan.

### 6.2 Saran

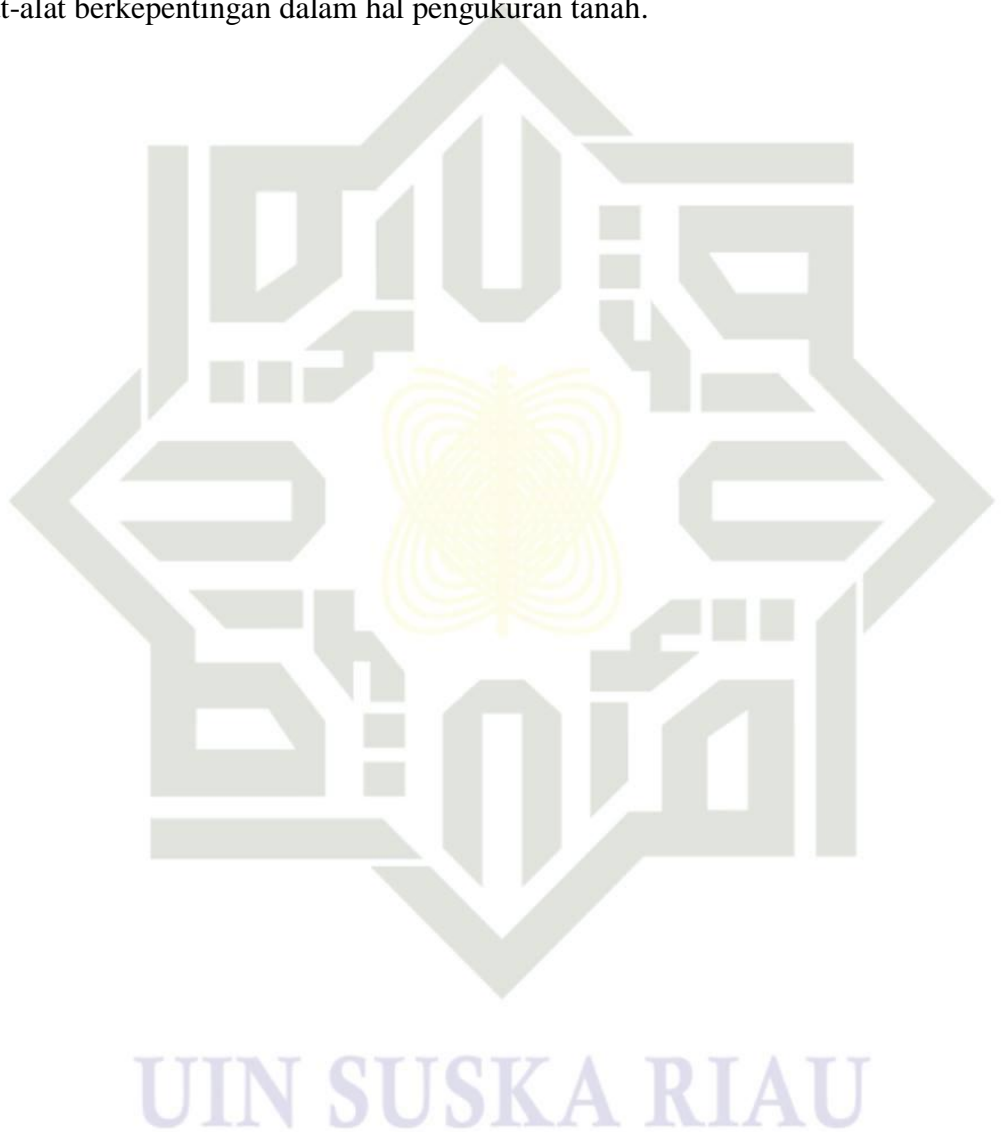
Adapun saran yang dapat penulis sampaikan berdasarkan hasil penelitaian yang telah dilakukan dan keterbatasan-keterbatasan yang ada, sebagai berikut:

1. Mengajukan pinjaman tenaga bantuan dari kantor-kantor BPN yang berada di wilayah Kepulauan Riau ataupun dari pihak ketiga.
2. Mengadakan survei lapangan lebih mendalam agar BPN lebih mengetahui kekurangan serta kelebihan pada lokasi pelaksanaan dan memiliki strategi-strategi dalam menghadapi kemungkinan persoalan yang akan terjadi.
3. Evaluasi yang dilakukan secara rutin dan mendetail. Dengan evaluasi yang baik dan rutin diharapkan dapat mempersiapkan alternatif-alternatif pemecah masalah yang tepat untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi didalam pelaksanaan program-program yang dilakukan oleh BPN. Kegiatan evaluasi diharapkan dapat memberikan solusi yang terbaik untuk pelaksanaan kinerja yang akan datang dan dapat memberi kontribusi terhadap peningkatan kualitas pelaksanaan program kedepannya.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Lebih menekankan dalam hal sosialisasi atau pendekatan terhadap masyarakat agar ilmu serta pengetahuan untuk kepentingan-kepentingan masyarakat itu sendiri tersampaikan dengan baik.
5. Melakukan pengecekan dan pemeliharaan rutin terhadap alat-alat kantor serta alat-alat berkepentingan dalam hal pengukuran tanah.





## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Anggraini, Gita. 2016. *Islam dan Agraria Telaah Normatif dan Historis Perjuangan Islam Dalam Merombak Ketidakadilan Agraria*. Yogyakarta: STPN Press.
- Artikunto dan Suharsimi. 2003. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Curtis, Dan B. Floyd James J. Winsor Jerry L. 1996. *Komunikasi Bisnis dan Profesional*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Djoko Prakoso & Budiman Adi Purwanto, 1985, *Eksistensi PRONA sebagai Pelaksanaan Mekanisme Fungsi Agraria*, Jakarta : Ghalia Indonesia, Hal 67-68
- Dwidjowijoto dan Riant Nugroho. 2007. *Anaalisis Kebijakan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Effendi, Sofian. 2012. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta; LP3ES.
- Harsono, Budi. 1999. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah pembentukan Undang-Undang pokok Agraria, isi dan Pelaksanaanya*. Jakarta: Djambatan.
- Nolind, Indra. 2011. *UUD RI 1945 & Amandemen*. Bandung: Pustaka Tanah Air.
- Ramusank dkk. 2011. *Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Santoso, Urip. 2010. *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tana.*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sodik, Achmad. 2013. *Politik Hukum Agraria*. Jakarta: Konpress.
- Supriadi. 2012. *Hukum Agraria*. Jakarta; Sinar Grafika.
- Tayibnapi dan Farida Yusuf. 2000. *Evaluasi Program*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Utami, Husein. *Evaluasi Kinerja Perusahaan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wibawa, Samodra. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Wiradi, Gunawan. 2009. *Reformasi Agraria Perjalanan yang Belum Berakhir*. Bogor: Sajogyo Institute.

### UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN MENTERI

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA),

Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 tahun 1995 tentang Perubahan Besarnya Pungutan Biaya Dalam Rangka Pemberian Sertipikat Hak Tanah yang Berasal Dari Pemberian Hak Atas Tanah Negara, Penegasan Hak Tanah Adat dan Konversi Bekas Hak Tanah Adat, yang Menjadi Obyek Proyek Operasi Nasional Agraria,

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Tentang Peraturan Dasaar Pokok-Pokok Agraria.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Program Nasional Agraria (PRONA).

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 Tentang PRONA.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 189 Tahun 1981 Tentang Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA).

### JURNAL

Anna Saranga, Kartika. 2019. *Kualitas Pelayanan Sertifikasi Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) Di Kantor Pertanahan Kabupaten Donggala*. Jurnal.untad.ac.id (diakses tanggal 18 Agustus 2020)

Mesak Mandala, Marthinus. 2016. *Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Melalui Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) Dalam Rangka Mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan Di Kabupaten Barito Timur*. e-journal.uajy.ac.id (diakses tanggal 18 Agustus 2020)

Sugianti, Linda. 2017. *Pelaksanaan sertifikasi tanah melalui proyek operasi nasional agraria di kantor pertanahan kabupaten jember*. <https://repository.unej.ac.id> (diakses tanggal 17 Agustus 2020)



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## LAMPIRAN

### Dokumentasi Penelitian



*Proses pendaftaran PRONA*





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



*Proses pengukuran lahan rumah tinggal masyarakat*



UIN SUSKA RIAU



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



*Proses pengukuran lahan kosong*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



*Proses pengukuran tanah rumah tempat tinggal*



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



*Proses pengentryan data dan beberapa sertifikat yang sudah siap*



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



*Proses pembagian sertifikat kepada masyarakat*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Masyarakat telah menerima sertifikat melalui PRONA



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Data Proyek Operasi Nasional**

**Kantor Badan Pertanahan Nasional Tanjung Balai Karimun  
di Kecamatan Buru Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau**

1. Desa Buru

NO	DESA	NO.HAK	NAMA	TTL	NIB	LUAS (M2)
1	Buru	32030601100144	MURNIATI SIREGAR	TAPANULI SELATAN 12/12/1969	488	346
2	Buru	32030601100145	RAJA HAZNITA	KUNDUR 23/02/1964	558	323
3	Buru	32030601100146	TUGIMIN	SELAT PANJANG 01/07/1966	603	3594
4	Buru	32030601100147	ABDUL RAHMAN	BURU 01/07/1966	625	4449
5	Buru	32030601100148	NURHALIMAH	BURU 01/07/1972	639	146
6	Buru	32030601100149	ZA HARUDIN	LUBUK PUDING 01/07/1970	631	177
7	Buru	32030601100150	RAJA BUNTAT ABBAS	TANJUNG BATU 12/09/1963	633	445
8	Buru	32030601100151	NORDIN	PARIT TEGAK 07/08/1967	637	181
9	Buru	32030601100152	SAMSUDIN	BURU 01/07/1970	638	183
10	Buru	32030601100153	RAIMAH	KANDIS 01/07/1977	640	181
11	Buru	32030601100154	ZULHASBI	PASIR PANGARAYAN 06/07/1984	178	264



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

12	Buru	32030601100155	A MOI	BURU 09/09/1958	194	686
13	Buru	32030601100156	JANTO	BURU 01/08/1973	179	263
14	Buru	32030601100157	MUHAMMAD ZAID	BURU 21/02/1943	155	192
15	Buru	32030601100158	ISHAK	BURU 22/05/1975	149	308
16	Buru	32030601100159	IMMELDA	MERAL 20/01/1961	188	226
17	Buru	32030601100160	USMAN	BURU 31/12/1975	617	1174
18	Buru	32030601100161	PATIMAH	BURU 01/07/1965	618	3491
19	Buru	32030601100162	TAUFIK	BURU 01/07/1952	619	5643
20	Buru	32030601100163	USMAN	BURU 11/02/1968	622	5067
21	Buru	32030601100164	PATIMAH	KANDIS BURU 01/07/1965	623	4702
22	Buru	32030601100165	LIM KO TIE	TANJUNG BALAI KARIMUN 20/02/1967	624	8374
23	Buru	32030601100166	MUHAMAD HASBI	KEPULAUAN RIA 02/01/1967	273	241
24	Buru	32030601100167	KARIMAH	BURU 15/04/1969	260	697
25	Buru	32030601100168	PATMAH AINI	BURU 01/07/1963	259	539
26	Buru	32030601100169	SIAU LANG	TLK.DALAM LB.PUDING K. 04/05/1968	366	202
27	Buru	32030601100170	DAENG SUSILAWATI	BUKIT SELEMBAK 13/01/1981	408	371
28	Buru	32030601100171	GIM TIN	MERAL 16/01/1966	189	226
29	Buru	32030601100172	GIM TIN	MERAL 16/01/1966	635	2238
30	Buru	32030601100173	DARAWATI	PELAKAR 01/07/1967	450	252
31	Buru	32030601100174	JABAR	BURU KARIMUN 31/12/1967	448	1621

# **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

33	Buru	32030601100176	SULARNO	URUNG KUNDUR 20/06/1978	403	517
34	Buru	32030601100177	KAMSI AH	BURU 20/07/1977	604	4006
35	Buru	32030601100178	FIRDAUS	BURU 01/06/1988	643	591
36	Buru	32030601100179	SUDI KYO	KP. BARU 01/07/1944	209	467
37	Buru	32030601100180	ISMAIL	BURU 07/11/1967	211	373
38	Buru	32030601100181	SAMADI	KEBUMEN 02/02/1977	210	238
39	Buru	32030601100182	NASIRIN	TG. BATU 11/04/1976	154	193
40	Buru	32030601100183	ZAINAL ABIDIN	BURU KARIMUN 23/05/1964	220	451
41	Buru	32030601100184	RAJA NURLIZA	BURU 27/09/1979	225	234
42	Buru	32030601100185	ACHMAD FAUSI	PAMEKASAN 01/04/1989	226	320
43	Buru	32030601100186	MUHAMMAD	BURU 21/12/1979	231	204
44	Buru	32030601100187	ZAINUDDIN	BURU 01/08/1966	232	396
45	Buru	32030601100188	RAJA KAMARUDDIN	ALAI KUNDUR 01/07/1961	242	616
46	Buru	32030601100189	ADAM	BURU 01/07/1956	246	300
47	Buru	32030601100190	ARMAN	KAYU ARA HITAM 29/02/1980	251	164
48	Buru	32030601100191	SALIM	PENYALAI 01/07/1950	255	280
49	Buru	32030601100192	RAJA ILYAS	BURU 17/01/1979	391	427
50	Buru	32030601100193	KHATI JAH	BURU 10/03/1973	393	395
51	Buru	32030601100194	ARPAH	PELAKAR 03/09/1977	418	349
52	Buru	32030601100195	MUHAMMAD SALEH	BURU 30/05/1965	582	449
53	Buru	32030601100196	R. RAZIMANSYAH	BURU 26/05/1974	590	504
54	Buru	32030601100197	RAHIM	BURU 01/01/1982	596	1150

# Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

55	Buru	32030601100198	ISMAIL	BURU 07/11/1967	600	424
56	Buru	32030601100199	MARYANA	BURU 22/08/1978	605	397
57	Buru	32030601100200	INDRA	BURU 24/11/1986	606	309
58	Buru	32030601100201	AZHAR	BEKAWAN 01/07/1965	609	727
59	Buru	32030601100202	DALI	KANDIS 26/08/1982	611	1076
60	Buru	32030601100203	MOHAMAD RIFANI	TELUK UMA 03/04/1977	616	936
61	Buru	32030601100204	MUHAMMAD RAFIK	BANDUL ALAI 03/07/1980	501	6294
62	Buru	32030601100205	NAZERI	SUNGAI ASAM KUNDUR 03/11/1978	153	495
63	Buru	32030601100206	SULARNO	URUNG KUNDUR 20/06/1978	195	581
64	Buru	32030601100207	R.HITAM	BURU 01/07/1958	198	783
65	Buru	32030601100208	SALAMAH	LUBUK PUDING 19/04/1962	202	199
66	Buru	32030601100209	ILYAS MASDUKI, S.PD	KERAWANG 07/04/1965	224	253
67	Buru	32030601100210	A SENG	BURU 07/09/1957	256	223
68	Buru	32030601100277	MARYATI	BURU 01/07/1962	169	130
69	Buru	32030601100211	KHADIJAH	PADANG BURU 07/02/1978	257	171
70	Buru	32030601100212	BAHAGIA	TG.HUTAN 31/12/1967	258	100
71	Buru	32030601100213	MUHAMMAD	BURU 09/12/1972	261	286
72	Buru	32030601100214	SARI	BURU 05/04/1970	262	392
73	Buru	32030601100215	MARYADI	BURU 10/03/1971	263	369
74	Buru	32030601100216	MUHAMMAD YAKOB	BURU 23/07/1973	264	344
75	Buru	32030601100217	DAPIT	BURU 20/02/1982	266	1369





### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

76	Buru	32030601100218	M. SALEH	BURU 21/03/1968	269	239
77	Buru	32030601100219	MAZHAR	BURU 01/07/1946	270	242
78	Buru	32030601100220	YANTO	BURU 06/10/1981	267	227
79	Buru	32030601100221	SUDIRMAN	BURU 02/02/1976	271	167
80	Buru	32030601100222	AMRAN	BURU KARIMUN 01/07/1972	272	143
81	Buru	32030601100223	HERMAN	BURU 21/03/1979	274	169
82	Buru	32030601100224	JUNAIDI	BURU KARIMUN 21/01/1984	275	502
83	Buru	32030601100225	SYAPARULLAH	JEMAJA P TUJUH 10/01/1966	537	1818
84	Buru	32030601100226	KASMAN	BURU 03/06/1972	559	1077
85	Buru	32030601100228	SALEH	PELAKAR 21/07/1960	176	498
86	Buru	32030601100229	RAJA HAZNITA	KUNDUR 23/02/1964	182	563
87	Buru	32030601100230	RAJA HAZNITA	KUNDUR 23/02/1964	184	138
88	Buru	32030601100231	NASIRIN	TANJUNG BATU 11/04/1976	185	110
89	Buru	32030601100232	MUHAMMAD HANAFI	BURU 01/06/1976	190	271
90	Buru	32030601100233	WILINDAHANA	BURU KARIMUN 02/01/1967	191	241
91	Buru	32030601100234	JEREMIAS PAYONG	TANJUNG BALAI 27/03/1978	203	1256
92	Buru	32030601100235	MARIA KEWA	BURU 07/12/1971	207	132
93	Buru	32030601100236	ROSWATI	CEREBON 01/07/1948	214	326
94	Buru	32030601100237	SALAMAH	LUBUK PUDING 19/04/1962	219	417
95	Buru	32030601100238	SARIMAH	BURU 03/06/1985	239	324

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

96	Buru	32030601100239	MAIMUNAH	BURU 01/07/1946	243	338
97	Buru	32030601100240	M.SYAHRUDDIN S.IP.M.SI	TANJUNG BALAI KARIMUN 07/12/1963	249	184
98	Buru	32030601100241	HALIMATUSSAKDIAH	SELAT MENDAUN 11/03/1966	250	192
99	Buru	32030601100242	FITRIANI	KUALA PATAH PARANG 29/10/1979	280	664
100	Buru	32030601100243	ISMAIL	BURU KARIMUN 02/03/1971	314	254
101	Buru	32030601100244	KHATIJAH	BURU KARIMUN 01/07/1962	268	257
102	Buru	32030601100245	MUHAMMAD YUSUF	BURU KARIMUN 30/08/1968	233	303
103	Buru	32030601100246	NORDIYANSYAH	BURU 03/07/1987	234	822
104	Buru	32030601100247	MUHAMAD SALEH	BURU 31/08/1968	237	1080
105	Buru	32030601100248	MUHAMMAD NOH	BURU 06/05/1972	238	333
106	Buru	32030601100249	KELENG	BURU 17/07/1934	244	233
107	Buru	32030601100250	SRI ZURYATI	BURU 12/08/1975	245	265
108	Buru	32030601100251	MUHAMMAD TAHER	BURU 13/09/1965	252	171
109	Buru	32030601100252	RAMLI	BURU 23/04/1982	253	238
110	Buru	32030601100253	AHMAD	BURU 15/04/1954	315	103
111	Buru	32030601100254	HAMIDAH	BURU 03/02/1956	316	228
112	Buru	32030601100255	DINO ALAMSYAH	BURU 14/02/1985	317	204
113	Buru	32030601100256	ALI	KAYU ARA HITAM 11/08/1968	319	181
114	Buru	32030601100257	JAMILAH	BURU 05/10/1979	320	216

# Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

115	Buru	32030601100258	DAENG ESAH	BURU 01/07/1953	321	191
116	Buru	32030601100259	ZAMRI	TL. PAKU 17/01/1990	322	571
117	Buru	32030601100260	DAENG USMAN	BURU 01/07/1961	324	91
118	Buru	32030601100261	DAENG UMAR	BURU 02/11/1965	325	100
119	Buru	32030601100262	DAENG EMELDA ASTUTI	BURU 19/05/1991	326	135
120	Buru	32030601100263	JARIAH	BURU 01/07/1964	328	82
121	Buru	32030601100264	AI'ISAH	BURU 01/07/1962	329	179
122	Buru	32030601100265	R. MUKHTAR	BURU 22/02/1968	367	389
123	Buru	32030601100266	RAHMAH	BURU 01/07/1962	369	472
124	Buru	32030601100267	ZAKARIA	BURU 28/10/1986	370	492
125	Buru	32030601100268	R. ZAHRIANTI	BURU 13/03/1975	371	472
126	Buru	32030601100269	R. FATIMAH	BURU KARIMUN 01/07/1953	375	171
127	Buru	32030601100270	RAJA BUNTAT	BURU 21/03/1944	394	366
128	Buru	32030601100271	RAJA MARYAM	BURU 21/04/1967	435	164
129	Buru	32030601100272	RAJA HAZNIDARRAHMI	BURU 01/07/1982	436	159
130	Buru	32030601100273	DEDY SUHARDY	BURU 23/03/1981	445	355
131	Buru	32030601100274	ZEN	PELAKAR 01/07/1953	446	1640
132	Buru	32030601100275	MUHAMMAD TAHIR	BURU 01/07/1949	368	1482
133	Buru	32030601100276	TAUFIK	BURU 01/07/1952	285	363
134	Buru	32030601100278	TAUFIK	BURU 01/07/1952	152	485
135	Buru	32030601100279	RAJA SAFIAH	BURU 21/04/1967	222	737
136	Buru	32030601100280	ABDUL TALIB	BURU 01/07/1958	228	399



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

137	Buru	32030601100281	RAJA DIDI IRAMA	TELUK DALAM 14/02/1984	318	134
138	Buru	32030601100282	MENCE EKAWATI	BURU 13/05/1979	365	534
139	Buru	32030601100283	ZULKIFLI	BURU 15/01/1960	443	98
140	Buru	32030601100284	YUSMAN	BANGKINANG 31/12/1972	467	4500
141	Buru	32030601100285	S.A. MAJID	SENDENRENG RAPPAN 01/07/1946	472	1134
142	Buru	32030601100286	ARNI	PELAKAR 17/10/1979	473	766
143	Buru	32030601100287	SUHEMI	LEBUH KUNDUR 31/08/1978	474	2589
144	Buru	32030601100288	MIDAH	BURU 04/05/1975	475	744
145	Buru	32030601100289	NAZRIAH	BURU 10/08/1980	476	1257
146	Buru	32030601100290	YUNIAR	PANGKALAN BURU 09/10/1984	477	1799
147	Buru	32030601100291	NORISAH	BURU 27/07/1974	478	212
148	Buru	32030601100292	LATIFAH	BURU 01/07/1955	479	7563
149	Buru	32030601100293	WARTINI	TG. HUTAN 27/05/1963	481	2017
150	Buru	32030601100294	MUHAMMAD NOH	BURU 01/07/1979	482	1401
151	Buru	32030601100295	SYAMSIDAR	TANJUNG BATU 05/02/1978	483	1525
152	Buru	32030601100296	ZARINA	BURU 23/07/1987	484	168
153	Buru	32030601100297	AMRI	PKL. BALAI BURU 21/07/1986	485	636
154	Buru	32030601100298	RAMLI	BURU 24/12/1980	486	4658
155	Buru	32030601100299	ZAHAHARAH	MERAL 30/06/1981	489	2773
156	Buru	32030601100300	ARIAH	PANGKALAN BALAI BURU	491	2216

# Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

				08/06/1962		
157	Buru	32030601100301	SAIFUL LIZAN	PANGKALAN BALAI BURU 28/05/1988	492	1582
158	Buru	32030601100302	EBI HIDAYAT	BURU 27/11/1995	493	7936
159	Buru	32030601100303	SAHARIZAL	BURU KARIMUN 06/10/1979	494	1036
160	Buru	32030601100304	SUHAIDI	BURU 27/03/1989	498	896
161	Buru	32030601100305	M.SAFRAN	BURU KARIMUN 05/06/1962	496	2125
162	Buru	32030601100306	MUDAH	BURU 02/07/1976	497	483
163	Buru	32030601100307	SYAMSIDAR	TANJUNG BATU 05/02/1978	502	319
164	Buru	32030601100308	TAN TJE HENG	BURU 01/07/1952	503	5389
165	Buru	32030601100309	SAIFUL LIZAN	PANGKALN BALAI BURU 28/05/1988	507	6594
166	Buru	32030601100310	RANTINA	JAMPALAN 01/07/1995	504	16020
167	Buru	32030601100311	RAPIDAH	BURU KARIMUN 13/03/1996	508	7057
168	Buru	32030601100312	IMILDA	BURU 22/03/1987	511	4468
169	Buru	32030601100313	SYAIFUL LOKMAN	BURU 25/02/1997	512	5538
170	Buru	32030601100314	SAIFUL LIZAN	PANGKALAN BALAI BURU 28/05/1968	519	6093
171	Buru	32030601100315	ROZITA	KAYU ARA HITAM 24/03/1982	521	897
172	Buru	32030601100316	ZALEHA	BURU KARIMUN 01/07/1958	522	3688
173	Buru	32030601100317	SYAIFUL LOKMAN	BURU 25/02/1997	523	918
174	Buru	32030601100318	RUSLAN	BURU 05/06/1974	524	890
175	Buru	32030601100319	DARMIWAN	BURU	525	948



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

				01/07/1955		
176	Buru	32030601100320	MANSOR	BURU 16/03/1988	526	1589
177	Buru	32030601100321	HASNAH	BURU 01/07/1954	528	357
178	Buru	32030601100322	ZAITUN	BURU 01/07/1942	531	323
179	Buru	32030601100323	DARMIWAN	BURU 01/07/1955	538	3935
180	Buru	32030601100324	SAPRI	BURU 01/04/1981	540	1943
181	Buru	32030601100325	M. SALEH	PELAKAR 21/07/1960	543	2047
182	Buru	32030601100326	ABBAS	TL. PINANG 01/07/1964	551	4308
183	Buru	32030601100327	ALI	BURU 01/07/1941	151	1189
184	Buru	32030601100328	MUKHTAR	BURU 25/08/1957	197	320
185	Buru	32030601100329	ABD. RAZAK	PANGKALAN BALAI 01/07/1959	196	350
186	Buru	32030601100330	HENDRA	BURU 08/02/1971	395	512
187	Buru	32030601100331	YUSLINAR	TELUK KUANTAN 01/07/1947	400	115
188	Buru	32030601100332	SAPIAH	JAWA BARAT 01/07/1953	401	286
189	Buru	32030601100333	RAJA MIZDAWATI	BURU 25/11/1982	406	262
190	Buru	32030601100334	DEDY SUHADY	BURU 23/03/1981	407	401
191	Buru	32030601100335	NASRIAH	BURU 01/07/1974	409	196
192	Buru	32030601100336	DAENG LAILA KUSUMAWATI	BURU 06/09/1985	411	207
193	Buru	32030601100337	PAUZIAH	SUNGGAI GUNTUNG 29/09/1975	412	240
194	Buru	32030601100338	RAJA ROSLY	PADANG BURU 22/05/1978	413	350
195	Buru	32030601100339	RAJA NORAINI	BURU 31/12/1961	414	156
196	Buru	32030601100340	RAJA USMAN	BURU 01/07/1956	416	170



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

197	Buru	32030601100341	RAJA HASYIM	BURU 01/07/1957	516	438
198	Buru	32030601100342	RAJA ZULKIFLI	BURU 03/04/1970	542	2890
199	Buru	32030601100343	ENDANG NORLINAWATI	BURU 02/03/1983	563	630
200	Buru	32030601100344	SUMARNI	PANGKALAN BALAI BURU 05/06/1963	565	1740
201	Buru	32030601100345	MARTIN	PANGKALAN BALAI BURU 09/11/1982	566	858
202	Buru	32030601100346	HERMAN	BONE 01/07/1958	570	919
203	Buru	32030601100347	ABAS	BURU 01/07/1954	571	6055
204	Buru	32030601100348	MUKHTAR	BURU 25/08/1957	577	493
205	Buru	32030601100349	APISAH	BURU 01/07/1962	578	351
206	Buru	32030601100350	NISAH		580	4122
207	Buru	32030601100351	ABU	P.BALAI BURU 01/07/1953	583	2477
208	Buru	32030601100352	NANI HERLIANA	BURU 03/06/1973	584	2113
209	Buru	32030601100353	ISKANDAR	BURU 02/11/1978	585	2359
210	Buru	32030601100354	ZURAHMAN	BURU 01/07/1958	587	4238
211	Buru	32030601100355	R. MAHMUD	PENARAH 17/02/1965	612	857
212	Buru	32030601100356	ZURAHMAN	BURU 01/07/1958	613	756
213	Buru	32030601100357	MASRI	BURU 14/02/1975	615	867
214	Buru	32030601100358	SAHARUDIN	PASIR PANJANG 18/06/1986	626	3441
215	Buru	32030601100359	COMEL	PARIT KARIMUN 10/12/1962	627	1584
216	Buru	32030601100360	ISMAIL	BURU 07/11/1967	636	439
217	Buru	32030601100361	ISMAIL	BURU 07/11/1967	415	266
218	Buru	32030601100362	ISMAIL	BURU 07/11/1967	468	7468

# Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

219	Buru	32030601100363	ISMAIL	BURU 07/11/1967	158	352
220	Buru	32030601100383	JAAFAR	BURU 05/03/1965	354	88
221	Buru	32030601100384	JAAFAR	BURU 05/03/1965	386	935
222	Buru	32030601100385	AFSAH	BURU KARIMUN 07/01/1967	404	291
223	Buru	32030601100386	AFSAH	BURU KARIMUN 07/01/1967	441	104
224	Buru	32030601100387	MAIMUNAH	TG. BALAI KARIMUN 31/12/1948	463	87
225	Buru	32030601100388	DEDY	BURU KARIMUN 12/08/1978	462	71
226	Buru	32030601100389	MUHAMAD	BURU KARIMUN 31/12/1964	510	4609
227	Buru	32030601100390	NOR	PELANGKAR 01/07/1977	398	274
228	Buru	32030601100391	MINAH	BURU KARIMUN 31/12/1959	592	3422
229	Buru	32030601100392	SUMARNI	PANGKALAN BALAI BURU 05/06/1963	593	5293
230	Buru	32030601100393	DAENG FADLI	BURU KARIMUN 23/12/1981	595	1258
231	Buru	32030601100394	A KUANG	KANDIS BURU 20/04/1973	597	311
232	Buru	32030601100395	SIU HI	KANDIS BURU 09/09/1963	598	1139
233	Buru	32030601100396	NORYANA	BURU 30/12/1981	599	1018
234	Buru	32030601100397	ABD. KARIM	SELAT PANJANG 01/07/1975	602	930
235	Buru	32030601100402	NORMAN	BURU 03/11/1974	646	533
236	Buru	32030601100398	ARAFIQ	BURU 31/01/1980	610	839
237	Buru	32030601100399	ROHANA	KANDIS 28/08/1988	645	321

# Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

238	Buru	32030601100403	FIRDAUS	BUURU 01/06/1988	601	411
239	Buru	32030601100404	MUHAMMAD RAFIK	BANDUL ALAI 03/07/1980	431	449
240	Buru	32030601100405	INDRA	BURU 24/11/1986	433	765
241	Buru	32030601100406	MUHAMMAD RAFIK	BANDUL ALAI 03/07/1980	434	454
242	Buru	32030601100407	MARSILA	BURU 14/11/1979	438	200
243	Buru	32030601100408	HALIMAH	BURU 01/07/1959	449	281
244	Buru	32030601100409	ZANAL	SEI SIKOP 28/02/1959	451	297
245	Buru	32030601100410	ITANIAH	BURU 04/01/1978	466	252
246	Buru	32030601100411	HUDS	BURU 01/07/1952	355	46
247	Buru	32030601100413	USMAN	BURU 01/07/1969	437	108
248	Buru	32030601100414	FARIDAH	BURU 08/01/1960	444	79
249	Buru	32030601100415	APSAH	BURU 07/01/1967	447	99
250	Buru	32030601100416	ISMAIL	BURU 07/11/1967	464	217
251	Buru	32030601100417	ZAINAH	BURU 31/12/1949	309	539
252	Buru	32030601100418	JUMIRA SUSANTI	BURU 06/07/1992	334	614
253	Buru	32030601100419	HALIMAH	BURU 01/07/1959	389	433
254	Buru	32030601100420	NASRIAH S.PD SD	BURU 13/04/1975	422	865
255	Buru	32030601100439	AMRAH	TELUK DALAM 01/07/2001	180	61
256	Buru	32030601100421	RADHIYAH	BURU 22/05/1979	172	112
257	Buru	32030601100422	ABDUL GANI	BURU 02/10/2001	186	138
258	Buru	32030601100423	YANG SENAH	SEI MATA PENARAH 31/12/1967	199	384
259	Buru	32030601100424	HERMANTO	LUBUK PUDING 28/06/1977	215	315



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

260	Buru	32030601100425	ROSITA LINDO TUTO	TLK DALAM 24/11/1975	216	238
261	Buru	32030601100426	MORNIYATI	BURU 01/07/1965	229	523
262	Buru	32030601100427	ZAUNAH	BURU 02/10/1977	287	296
263	Buru	32030601100428	SAPIAH	BURU 01/07/1938	350	274
264	Buru	32030601100429	HALIMATUL SADIAH	BURRU 03/04/1972	356	285
265	Buru	32030601100430	NORMANSYAH	BURU 07/07/1966	362	189
266	Buru	32030601100431	HAMIDAH	BURU 03/02/1956	385	352
267	Buru	32030601100432	IBRAHIM	BURU 04/08/1953	440	125

### 2. Desa Lubuk Puding

NO	DESA	NO.HAK	NAMA	TTL	NIB	LUAS (M2)
1	Lubuk Puding	32030602100021	JONO	BURU 22/10/1970	180	220
2	Lubuk Puding	32030602100022	K A PENG	TELUK DALAM 21/7/1976	179	429
3	Lubuk Puding	32030602100023	MINAH	TELUK DALAM 01/07/1960	165	359
4	Lubuk Puding	32030602100024	SALAMAH	TELUK DALAM 24/06/1978	91	231
5	Lubuk Puding	32030602100025	ELMI ISKANDAR	KAYU ARA HITAM 24/02/1976	102	273
6	Lubuk Puding	32030602100026	ELMI ISKANDAR	KAYU ARA HITAM 24/02/1976	103	382
7	Lubuk Puding	32030602100027	ATAN	GUNTUNG 08/09/1945	50	7812
8	Lubuk Puding	32030602100028	TITI ARNIATY	DABO SINGKEP 22/08/1969	37	2273
9	Lubuk Puding	32030602100029	MONA	LUBUK PUDING 24/08/1985	53	308
10	Lubuk Puding	32030602100030	LINA	PENARAH	32	186

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1	Lubuk Puding	32030602100031	AHMAD	01/07/1980 TELU DALAM 01/07/1945	27	242
2	Lubuk Puding	32030602100032	NORDIN	KAYU ARA HITAM 16/05/1979	74	800
3	Lubuk Puding	32030602100033	ERNI SUNARNI	TELUK DALAM 04/03/1973	121	1295
4	Lubuk Puding	32030602100034	JEMI LAU	TG.BALAI 30/10/1976	129	574
5	Lubuk Puding	32030602100035	ADRIANTO TJIA	KUALA ENOK 21/03/1968	122	863
6	Lubuk Puding	32030602100036	NORMADIAH	TELUK DALAM 01/07/1964	147	2272
7	Lubuk Puding	32030602100037	ERNI SUNARNI	TELUK DALAM 04/03/1973	152	174
8	Lubuk Puding	32030602100038	ERNI SUNARNI	TELUK DALAM 04/03/1973	153	220
9	Lubuk Puding	32030602100039	ABDUL HAMID	MORO 01/07/1960	267	539
10	Lubuk Puding	32030602100040	AWANG PANDAK	LB.PUDING 01/07/1957	270	2641
11	Lubuk Puding	32030602100041	ANISAH	LUBUK PUDING 15/04/1969	296	388
12	Lubuk Puding	32030602100042	SIAU JAM	URUNG 28/06/1941	294	1224
13	Lubuk Puding	32030602100103	SUHAIMI S.SOS	TANJUNG 14/04/1970	332	166
14	Lubuk Puding	32030602100044	MAIMUNAH	TANJUNG 25/03/1982	370	290
15	Lubuk Puding	32030602100045	ALIZAN	TG.LUBUK PUDING 01/07/1964	368	1200
16	Lubuk Puding	32030602100046	USMAN	LUBUK PUDING 20/09/1953	394	3260
17	Lubuk Puding	32030602100047	ASIAH	TANJUNG 01/07/1958	393	769
18	Lubuk Puding	32030602100048	KAMARIAH	TANJUNG 31/12/1967	416	238
19	Lubuk Puding	32030602100043	KAMISAH	TANJUNG 01/07/1972	415	417
20	Lubuk Puding	32030602100049	NOR KEMALA SARI	TANJUNG 06/07/1979	401	1078
21	Lubuk Puding	32030602100050	MUSTAFA	TANJUNG 02/03/1977	412	522

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

32	Lubuk Puding	32030602100054	MUSA	TL.DALAM 27/05/1971	235	333
33	Lubuk Puding	32030602100053	RAMNAH	TL.DALAM 18/12/1983	229	879
34	Lubuk Puding	32030602100055	TAMSUL	SUNGAI LAKAM 30/06/1968	247	1241
35	Lubuk Puding	32030602100052	CIA KONG MOI	LUBUK PUDING 11/02/1952	206	1417
36	Lubuk Puding	32030602100051	DAUD	PULAU TERONG 18/06/1948	201	4752
37	Lubuk Puding	32030602100058	HERMAN	KAYU ARA HITAM 02/05/1980	480	1231
38	Lubuk Puding	32030602100056	HAK SOI	KAYU ARA HITAM 03/01/1977	452	1934
39	Lubuk Puding	32030602100057	IRWAN	L.B. PUDING 23/05/1987	458	343
40	Lubuk Puding	32030602100059	M.YAKOP	LUBUK PUDING 02/12/1974	341	194
41	Lubuk Puding	32030602100060	BUJANG	TANJUNG 18/05/1974	334	3017
42	Lubuk Puding	32030602100061	BAU	LUBUK PUDING 01/07/1975	349	259
43	Lubuk Puding	32030602100062	ABDUL RAHMAN	LUBUK PUDING 14/12/1979	361	110
44	Lubuk Puding	32030602100063	SYAWALUDDIN	TANJUNG 12/07/1983	425	460
45	Lubuk Puding	32030602100064	NE	KAYU ARA HITAM 01/07/1950	421	2291
46	Lubuk Puding	32030602100065	JAKFAR	TELUK DALAM 16/01/1967	249	1627
47	Lubuk Puding	32030602100066	KAMISAH	KAYU ARA HITAM 01/07/1950	422	884
48	Lubuk Puding	32030602100067	YANTI	LUBUK PUDING 01/07/1971	278	984
49	Lubuk Puding	32030602100068	AZHAR	LUBUK PUDING	356	478





### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

50	Lubuk Puding	32030602100069	JONO	24/08/1969 BURU 22/10/1970	181	359
51	Lubuk Puding	32030602100070	HUSIN	TL DALAM 28/04/1975	230	469
52	Lubuk Puding	32030602100071	HI TJUNG	KANDIS BURU 25/03/1956	159	529
53	Lubuk Puding	32030602100072	DRS. ABDUL MALIK, MPD	LUBUK PUDING 09/04/1958	84	836
54	Lubuk Puding	32030602100073	GANI	TELUK DALAM LB.PUDING 04/07/1982	176	521
55	Lubuk Puding	32030602100074	NURAINI	LUBUK PUDING 12/08/1971	113	916
56	Lubuk Puding	32030602100075	NORDIN	KAYU ARA HITAM 16/05/1979	245	879
57	Lubuk Puding	32030602100076	MARINI	TELUK DALAM 19/02/1976	169	279
58	Lubuk Puding	32030602100077	PATMAH AINI	BURU 01/07/1963	101	271
59	Lubuk Puding	32030602100078	PATMAH AINI	BURU 01/07/1963	104	163
60	Lubuk Puding	32030602100079	SARAWATI	SEI BULUH 01/07/1971	163	626
61	Lubuk Puding	32030602100080	HI TJUNG	KANDIS BURU 25/03/1956	160	270
62	Lubuk Puding	32030602100081	JUMARI	TANJUNG 24/11/1978	385	1105
63	Lubuk Puding	32030602100082	DAUD	TELUK DALAM LB.PUDING 22/03/1962	273	539
64	Lubuk Puding	32030602100083	NORDIN	KAYU ARA HITAM 16/05/1979	509	1587
65	Lubuk Puding	32030602100084	HI TJUNG	KANDIS 25/03/1956	161	220
66	Lubuk Puding	32030602100085	NORDIN	KAYU ARA HITAM 16/05/1979	253	1560
67	Lubuk Puding	32030602100086	NORDIN	KAYU ARA HITAM 16/05/1979	256	1024
68	Lubuk Puding	32030602100087	SIU KIANG	BURU 06/06/1960	93	1456

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

69	Lubuk Puding	32030602100088	YULI NELVIA	PADANG 18/07/1972	112	932
70	Lubuk Puding	32030602100089	IRMANILIS	KAYU ARA HITAM 11/04/1985	473	445
71	Lubuk Puding	32030602100090	JUMADI	KAYU ARA HITAM 28/10/1988	444	459
72	Lubuk Puding	32030602100091	MARYANI	TELUK DALAM 14/01/1985	239	280
73	Lubuk Puding	32030602100092	ROHAYA	TELUK DALAM 24/12/1974	234	861
74	Lubuk Puding	32030602100093	MARIAM	TELUK DALAM 03/12/1950	475	1839
75	Lubuk Puding	32030602100094	JASMAWATI	LUBUK PIDING 17/06/1967	266	236
76	Lubuk Puding	32030602100095	INDRA	LUBUK PUDING 06/12/1982	307	158
77	Lubuk Puding	32030602100096	MUHAMMAD SONY LUBIS	MEDAN 10/02/1965	70	801
78	Lubuk Puding	32030602100097	MOHAMAD YANI	TL.DALAM 31/12/1968	39	366
79	Lubuk Puding	32030602100098	AZHAR	SERENGE 01/07/1974	57	1676
80	Lubuk Puding	32030602100099	DAUD	TELUK DALAM 22/03/1962	71	1775
81	Lubuk Puding	32030602100100	HERIZAH HERIYAWATI	LUBUK PUDING 24/01/1975	265	392
82	Lubuk Puding	32030602100101	AZIZAH	TELUK DALAM 22/08/1977	225	332
83	Lubuk Puding	32030602100102	KIMAN	BURU 09/10/1983	514	3159
84	Lubuk Puding	32030602100104	KIE SENG	BURU 19/12/1956	155	6775
85	Lubuk Puding	32030602100105	PARMAN	PULAU NYAMUK 01/07/1961	34	723
86	Lubuk Puding	32030602100106	JAHRAT	BURU 01/07/1954	232	1773
87	Lubuk Puding	32030602100107	ISMAIL	TELUK DALAM 01/07/1958	30	1093
88	Lubuk Puding	32030602100108	JUMIYATI S.P.D.SD	TELUK DALAM 29/02/1972	255	658
89	Lubuk Puding	32030602100109	NORMALA	TELUK DALAM 01/07/1984	236	274

# Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

90	Lubuk Puding	32030602100110	MUHAMMAD	TELUK DALAM 01/07/1958	237	877
91	Lubuk Puding	32030602100111	DAUD	TELUK DALAM 22/03/1962	252	12380
92	Lubuk Puding	32030602100112	SERI MELATI	TELUK DALAM 24/04/1979	233	1581
93	Lubuk Puding	32030602100113	SAIFUL BAHRI	TELUK DALAM 01/07/1970	177	2399
94	Lubuk Puding	32030602100114	ISKANDAR	LUBUK PUDING 26/02/1977	250	1773
95	Lubuk Puding	32030602100115	SUDIR	TELUK DALAM 01/07/1958	238	614
96	Lubuk Puding	32030602100116	ISA	TL.DALAM 01/07/1967	240	629
97	Lubuk Puding	32030602100117	JULISA	TELUK DALAM 01/02/1990	241	158
98	Lubuk Puding	32030602100118	SARJONO	BURU 17/01/1982	62	554
99	Lubuk Puding	32030602100119	AHMAD	LUBUK PUDING 04/02/1964	353	541
100	Lubuk Puding	32030602100120	RUSNAH	LB.PUDING 01/07/1957	271	3722
101	Lubuk Puding	32030602100121	ASMAWIYAH	TELUK DALAM 30/05/1975	49	662
102	Lubuk Puding	32030602100122	MUHAMAD ZIN	TELUK DALAM 01/07/1942	55	697
103	Lubuk Puding	32030602100123	SAMSUDIN	TELUK DALAM 12/12/1979	154	263
104	Lubuk Puding	32030602100124	YUSRI	TELUK DALAM 02/10/1979	167	351
105	Lubuk Puding	32030602100125	ABDUL RAHMAN	TELUK DALAM 12/12/1957	164	805
106	Lubuk Puding	32030602100126	IRWANSYAH	TELUK DALAM 01/05/1985	172	241
107	Lubuk Puding	32030602100127	HANAPI	TELUK DALAM 03/02/1972	156	1332
108	Lubuk Puding	32030602100128	MAIMUN	TELUK DALAM 01/07/1956	168	154
109	Lubuk Puding	32030602100129	ZAMRI	TELUK DALAM 08/09/1981	170	386
110	Lubuk Puding	32030602100130	M.YAKOP	LUBUK PUDING 02/12/1974	344	940



# Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

111	Lubuk Puding	32030602100131	KAHARUDIN	TELUK DALAM 26/05/1978	88	1071
112	Lubuk Puding	32030602100132	MAIMUNAH	TELUK DALAM 01/07/1952	92	646
113	Lubuk Puding	32030602100133	AISYAH	TELUK DALAM 23/05/1984	87	1273
114	Lubuk Puding	32030602100134	KAMARUDIN	TELUK DALAM 19/12/1975	89	829
115	Lubuk Puding	32030602100135	ABD.JABAR	TELUK DALAM 06/08/1971	90	385
116	Lubuk Puding	32030602100136	ABD.JABAR	TELUK DALAM 06/08/1971	115	321
117	Lubuk Puding	32030602100137	SYAMSUDDIN	BURU 21/11/1983	85	540
118	Lubuk Puding	32030602100138	RAMLAH	TELUK DALAM 01/07/1951	105	958
119	Lubuk Puding	32030602100139	MUHAMAD TAHIR	TL.DALAM 17/11/1969	82	719
120	Lubuk Puding	32030602100140	A.GANI	TELUK DALAM 16/12/1967	81	811
121	Lubuk Puding	32030602100141	MAIMUN	TELUK DALAM 07/06/1970	83	261
122	Lubuk Puding	32030602100142	ABDUL RAHMAN	TELUK DALAM KAMPAR 31/12/1974	109	545
123	Lubuk Puding	32030602100143	SIU PO	BURU 15/04/1965	86	413
124	Lubuk Puding	32030602100144	MARYANI	URUNG 30/06/1980	97	1146
125	Lubuk Puding	32030602100145	ABDULLAH	TELUK DALAM 01/07/1943	98	1626
126	Lubuk Puding	32030602100146	DAUD	TELUK DALAM 22/03/1962	106	719
127	Lubuk Puding	32030602100147	SYAFRIZAL	PADANG 25/09/1971	111	379
128	Lubuk Puding	32030602100148	MUHAMAD RIZWAN SYAH	LUBUK PUDING 28/06/1998	277	533
129	Lubuk Puding	32030602100149	SAERAH	LUBUK PUDING 01/07/1966	279	840
130	Lubuk Puding	32030602100150	SAERAH	LUBUK PUDING 01/07/1966	280	384
131	Lubuk Puding	32030602100151	KHADIJAH	LUBUK PUDING 28/04/1977	281	1679

# Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

132	Lubuk Puding	32030602100152	AIDIL ADHAR	LUBUK PUDING 06/02/1971	282	3470
133	Lubuk Puding	32030602100153	ABDULLAH	LUBUK PUDING 04/06/1951	283	3842
134	Lubuk Puding	32030602100154	SAID	LUBUK PUDING 01/07/1954	285	2970
135	Lubuk Puding	32030602100155	TAMAT	LUBUK PUDING 01/07/1977	286	519
136	Lubuk Puding	32030602100156	BASIYAH	LUBUK PUDING 01/07/1967	291	1095
137	Lubuk Puding	32030602100157	SARIAH	LUBUK PUDING 18/06/1962	293	935
138	Lubuk Puding	32030602100158	M.SIDDIK	URUNG 14/09/1962	300	634
139	Lubuk Puding	32030602100159	ERMA ROSANTI	LUBUK PUDING 04/01/1986	303	264
140	Lubuk Puding	32030602100160	ALIYAH	KAYU ARA HITAM 01/07/1955	308	4030
141	Lubuk Puding	32030602100161	BUJANG	LUBUK PUDING 01/07/1974	310	1150
142	Lubuk Puding	32030602100162	AWANG SUMARDI	LUBUK PUDING 17/07/1967	312	330
143	Lubuk Puding	32030602100163	SALIM	LUBUK PUDING 01/07/1958	317	217
144	Lubuk Puding	32030602100164	HARUN	LUBUK PUDING 10/11/1973	318	132
145	Lubuk Puding	32030602100165	SANDORA	LUBUK PUDING 21/11/1973	321	1809
146	Lubuk Puding	32030602100166	SUHAIMI, S.SOS	TANJUNG 14/04/1970	508	477
147	Lubuk Puding	32030602100206	ABIDIN	BUURU 31/12/1948	407	7148
148	Lubuk Puding	32030602100207	ROSITA DEWI	TANJUNG 24/03/1975	404	715



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

149	Lubuk Puding	32030602100208	AMINAH	TANJUNG 26/02/1962	399	695
150	Lubuk Puding	32030602100209	HUSIN	LUBUK PUDING 09/06/1949	417	700
151	Lubuk Puding	32030602100304	BAHARI	TANJUNG 01/07/1939	382	822
152	Lubuk Puding	32030602100210	ABDUL RAHIM	TANJUNG 01/07/1942	408	3485
153	Lubuk Puding	32030602100211	KAMARUDDIN	KAYU ARA HITAM 24/03/1961	411	1519
154	Lubuk Puding	32030602100212	ROSLI	TANJUNG 28/04/1965	413	275
155	Lubuk Puding	32030602100167	AWANG PANDAK	LB. PUDING 01/07/1957	330	1689
156	Lubuk Puding	32030602100168	NORISYAH	LUBUK PUDING 07/06/1984	306	145
157	Lubuk Puding	32030602100169	ROSNI	LUBUK PUDING 01/07/1966	311	1613
158	Lubuk Puding	32030602100213	ALI	KAYU ARA HITAM 01/07/1961	389	3540
159	Lubuk Puding	32030602100170	JAMALIAH	PELAKAR 01/07/1958	419	129
160	Lubuk Puding	32030602100171	ISHAK	TANJUNG 22/01/1964	414	43
161	Lubuk Puding	32030602100172	ZAINAL	PANGKALAN BALAI 01/07/1955	423	186
162	Lubuk Puding	32030602100173	JUMADI ISKANDARSYAH	TANJUNG 08/05/1987	424	202
163	Lubuk Puding	32030602100174	SEPET	KAYU ARA HITAM 09/03/1975	426	666
164	Lubuk Puding	32030602100175	SURAYA	KAYU ARA HITAM 09/03/1974	432	292
165	Lubuk Puding	32030602100176	KAMARIAH	KAYU ARA HITAM 01/07/1967	433	446
166	Lubuk Puding	32030602100177	JUPRIDIN	KAYU ARA HITAM 11/06/1982	435	894
167	Lubuk Puding	32030602100178	PUASA	KAYU ARA	437	217



# Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

				HITAM 01/07/1961		
168	Lubuk Puding	32030602100179	AWANG	KAYU ARA HITAM 01/07/1941	441	642
169	Lubuk Puding	32030602100180	ALI	KAYU ARA HITAM 01/07/1955	443	2580
170	Lubuk Puding	32030602100181	ZUHARI	TANJUNG 02/06/1975	373	483
171	Lubuk Puding	32030602100182	KELAT	LUBUK PUDING 01/07/1958	391	1207
172	Lubuk Puding	32030602100183	BAHARI	TANJUNG 01/07/1939	381	4142
173	Lubuk Puding	32030602100184	SITI SARA	PARIT 01/07/1956	371	3602
174	Lubuk Puding	32030602100185	KAMARIAH	KAYU ARA HITAM 01/07/1961	384	2436
175	Lubuk Puding	32030602100186	JAMILAH	KAYU ARA HITAM 03/04/1952	503	1252
176	Lubuk Puding	32030602100187	MOHD.SIDDIQ,A .MA	LUBUK PUDING 20/08/1953	524	4459
177	Lubuk Puding	32030602100188	WATINI	JAKARTA 30/11/1969	500	890
178	Lubuk Puding	32030602100189	USMAN	LUBUK PUDING 20/09/1953	501	2974
179	Lubuk Puding	32030602100214	FIRDAUS, S.HI,MPD.I	LUBUK PUDING 13/09/1961	496	771
180	Lubuk Puding	32030602100190	SAMAT, S.SOS	LUBUK PUDING 18/04/1971	505	1269
181	Lubuk Puding	32030602100191	ABAS	LUBUK PUDING 01/07/1970	497	1891
182	Lubuk Puding	32030602100192	ZAMRI	KAYU ARA HITAM 26/05/1980	507	168
183	Lubuk Puding	32030602100193	ALI	TANJUNG 01/07/1951	498	1739
184	Lubuk Puding	32030602100194	ADAM	TANJUNG 11/04/1950	504	5441



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

185	Lubuk Puding	32030602100195	ARMIZAN	TANJUNG 23/08/1984	492	418
186	Lubuk Puding	32030602100196	SAMIAH	TANJUNG 02/10/1979	493	1826
187	Lubuk Puding	32030602100197	FAKHRUDDIN ARRAZI	TANJUNG 15/01/1991	495	623
188	Lubuk Puding	32030602100198	ABDULLAH	TANJUNG 01/07/1952	502	3180
189	Lubuk Puding	32030602100199	ZAINAH	LUBUK PUDING 01/07/1962	364	2087
190	Lubuk Puding	32030602100200	SULAIMAN	LUBUK PUDING 27/05/1961	339	1489
191	Lubuk Puding	32030602100201	YUSDI	LUBUK PUDING 01/01/1972	367	750
192	Lubuk Puding	32030602100202	AHMAD	LUBUK PUDING 01/07/1957	362	230
193	Lubuk Puding	32030602100203	SALAM	LUBUK PUDING 09/05/1965	346	294

( Sumber: Kantor Badan Pertanahan Nasional Tanjung Balai Karimun 2018 )



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARIMUN**

Jl. Jend. Sudirman Tanjung Balai Karimun Telp. 0777-7366045 Fax. 7366047 : [www.kab-karimun.bpn.go.id](http://www.kab-karimun.bpn.go.id)

**SURAT KETERANGAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun, menerangkan bahwa :

Nama : M. Oulis Eka Putra  
Tempat / Tgl Lahir : Sei. Ungar, 9 Agustus 1995  
NIM : 11375103441  
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau  
Jurusan : Administrasi Negara

Yang bersangkutan telah mengadakan penelitian di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karimun, terhitung 25 Desember 2018 s/d 7 Januari 2019 guna penulisan skripsi dengan judul : **"Analisis Pelaksanaan Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Tanjung Balai Karimun di Kecamatan Buru Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanjung Balai Karimun, 7 Januari 2019  
Kepala Kantor Pertanahan  
Kabupaten Karimun

  
**Jemmy Dolly Winerungan, A. Ptnh**  
NIP. 19660626 198603 1 002

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

Penulis bernama lengkap M. Oulis Eka Putra yang dilahirkan di Tanjung Batu pada tanggal 9 Agustus 1995. Penulis merupakan anak Pertama dari dua bersaudara dari pasangan Ayahanda Yahya dan Ibunda Lusiana. Riwayat Pendidikan Tahun 2007, penulis berhasil menyelesaikan pendidikan di SDN 001 Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun. Tahun 2010, penulis berhasil menyelesaikan pendidikan di SMP N 1 Kecamatan Kabupaten Karimun. Tahun 2013, penulis berhasil menyelesaikan pendidikan di SMA A. Wahid Hasyim Tebuireng Kabupaten Jombang Tahun 2013.

Pada Tahun 2013 penulis diterima sebagai Mahasiswa Strata Satu (S1) di Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Jurusan Administrasi Negara melalui jalur SBMPTN. Pada Bulan Februari 2016 Penulis melaksanakan PKL (Praktek Kerja Lapangan) di Kantor Sekretariat Daerah Tanjung Balai Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau dan pada bulan Juni 2016 penulis melaksanakan KUKERTA (Kuliah Kerja Nyata) di Desa Kumain, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau

Tahun 2020, tepatnya pada tanggal 12 Agustus 2020 penulis berhasil mendapatkan gelar Sarjana Administrasi Negara dengan menyelesaikan tugas akhir (Skripsi) dengan judul **“Analisis Pelaksanaan Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) Pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Tanjung Balai Karimun di Kecamatan Buru Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau”** dibawah Bimbingan Bapak Dr. Rodi Wahyudi S.Sos, M.Soc, Sc dan dinyatakan lulus.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.